

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA

*Gross Regional Domestic Product
by Industrial Origin*

DKI JAKARTA

2010-2014



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT LAPANGAN USAHA 2010-2014

ISSN : 2338-8447
Nomor Publikasi : 31550.1401
Katalog BPS : 9302001.31

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : ix + 87

Naskah :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab : Nyoto Widodo

Editor : Dwi Paramita Dewi
Yayat Rochadiyat

Koordinator : Favten Ari Pujiastuti
Anggota : Supendi

Layout Publikasi : Sudirman
Supendi

Gambar Kulit : Inda Dwi Setiawati

Diterbitkan Oleh :
BPS Provinsi DKI Jakarta

Boleh dikutip dengan menyebutkan nama sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta menurut Lapangan Usaha secara tahunan diterbitkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian DKI Jakarta tahun 2014 secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2010 – 2014 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, PDRB yang disajikan dalam buku ini sudah menggunakan tahun dasar yang baru yakni tahun 2010. Disamping itu, pembagian lapangan usaha sudah mengacu pada KBLI 2009. Sehingga secara nominal berbeda dengan publikasi yang sudah diterbitkan sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penerbitan ini terlaksana. Saran perbaikan selalu diharapkan untuk penyempurnaan penerbitan selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

DKI Jakarta, Juli 2015
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA,

NYOTO WIDODO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PENJELASAN TEKNIS	xi
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	1
1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	1
1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	2
II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	7
2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7
2.2 Pertambangan dan Penggalian	11
2.3 Industri Pengolahan	12
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas	16
2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	17
2.6 Konstruksi	18
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19
2.8 Transportasi dan Pergudangan	20
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22
2.10 Informasi dan Komunikasi	23
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi	24
2.12 Real Estat	29
2.13 Jasa Perusahaan	29
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30
2.15 Jasa Pendidikan	31
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31
2.17 Jasa Lainnya	32
III. TINJAUAN EKONOMI PROVINSI DKI JAKARTA	35
3.1 Struktur Ekonomi	36
3.2 Pertumbuhan Ekonomi	37
3.3 PDRB Perkapita	39
IV. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	41
4.1 Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	41
4.2 Pertambangan dan Penggalian	42
4.3 Industri Pengolahan	43
4.4 Pengadaan Listrik dan Gas	45
4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46
4.6 Konstruksi	47
4.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47
4.8 Transportasi dan Pergudangan	48

4.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50
4.10	Informasi dan Komunikasi	51
4.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	52
4.12	Real Estat	54
4.13	Jasa Perusahaan	54
4.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	55
4.15	Jasa Pendidikan	56
4.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57
4.17	Jasa lainnya	57

<http://jakarta.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 4.1	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen), 2011 dan 2014	42
Gambar 4.2	Laju Pertumbuhan PDRB Pertambangan dan Penggalan (Persen), 2011-2014	43
Gambar 4.3	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (Persen), 2010- 2014	45
Gambar 4.4	Laju Pertumbuhan PDRB Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2011- 2014	46
Gambar 4.5	Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Konstruksi (Persen), 2010-2014	47
Gambar 4.6	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2011- 2014	48
Gambar 4.7	Laju Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2011-2014	50
Gambar 4.8	Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman (Persen), 2011- 2014	51
Gambar 4.9	Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Informasi dan Komunikasi (Persen), 2010-2014	52
Gambar 4.10	Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2010-2014	53
Gambar 4.11	Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Real Estate (Persen), 2010-2014	54
Gambar 4.12	Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Perusahaan (Persen), 2010-2014	55
Gambar 4.13	Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Persen), 2010-2014	56
Gambar 4.14	Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Pendidikan (Persen), 2010-2014	56
Gambar 4.15	Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Persen), 2010-2014	57
Gambar 4.16	Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Lainnya (Persen), 2010-2014	58

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	4
Tabel 1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	5
Tabel 3.1	PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (Miliar Rupiah), 2010-2014	35
Tabel 3.2	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2010-2014	37
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2010-2014	39
Tabel 3.4	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-2014	39
Tabel 4.1	Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen), 2010-2014	41
Tabel 4.2	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2010-2014	43
Tabel 4.3	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Industri Pengolahan (Persen), 2010-2014	44
Tabel 4.4	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2010-2014	45
Tabel 4.5	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2010-2014	48
Tabel 4.6	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2010-2014	49
Tabel 4.7	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2010-2014	50
Tabel 4.8	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2010-2014	53

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.1	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2010-2014	60
Lampiran 1.2	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2010-2014	61
Lampiran 1.3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2010-2014	62
Lampiran 1.4	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2010-2014	63
Lampiran 1.5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2011-2014	64
Lampiran 1.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2011-2014	65
Lampiran 1.7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2010-2014	66
Lampiran 1.8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2010-2014	67
Lampiran 1.9	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2010-2014	68
Lampiran 1.10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2011-2014	69

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan telah mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai "Sistem Neraca Nasional". Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan provinsi untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.
6. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
7. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.
8. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.



<http://jakarta.bps.go.id>

PENJELASAN UMUM *Bab 5*

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangu–nan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diper–lukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerata–kan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan per–kataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan ma–syarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka angka pendapa–tan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan eko–nomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat ber–bagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekono–mian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber

daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PRB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu provinsi.

1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;

- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun ;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- Konsep dan Cakupan: Perlakuan Work-in Progress (WIP) pada Cultivated Biological Resources (CBR):
- Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari Imputed Bank Services Charge (IBSC) menjadi Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)
- Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (Basic Price). Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
- Klasifikasi : Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification

(ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 untuk PDRB menurut lapangan usaha antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

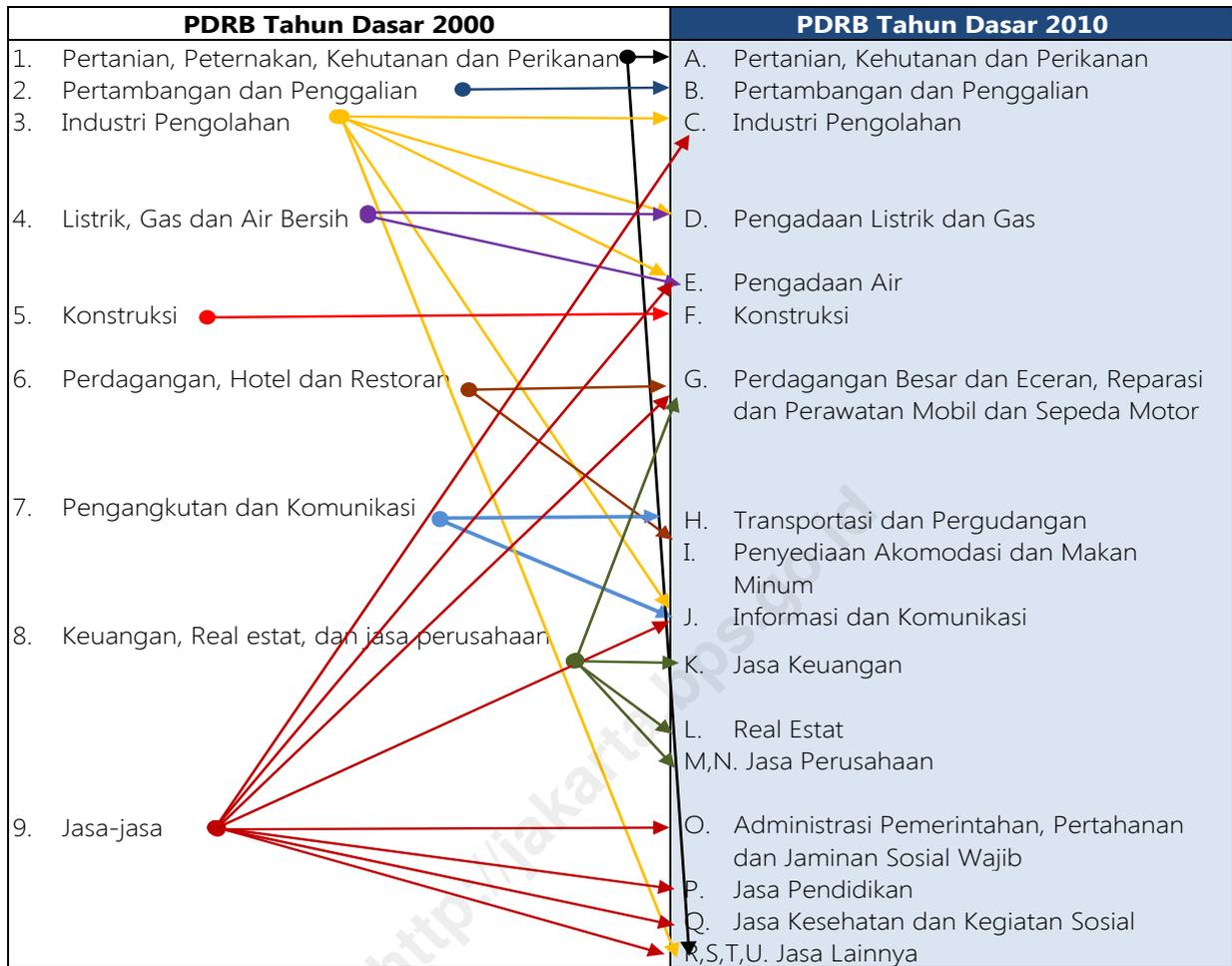
Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC) .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Valuasi	Harga Produsen:	Harga Dasar:
4. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010





<http://jakarta.bps.go.id>

RUANG LINGKUP DAN METODE *Bab 2* PENGHITUNGAN

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

a. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gambili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

b. Tanaman Hortikultura

Subkategori tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Subdit Statistik Hortikultura, BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

c. Tanaman Perkebunan

Subkategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

d. Peternakan

Subkategori Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit

Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data

indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan dan Pembudidaya Tanaman Kehutanan) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

3. Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, molusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicapuk juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Metode Penghitungan Output dan Nilai Tambah

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan Cultivated Biological Resources (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (standing crops) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (standing crops) di awal periode yang disebut sebagai Work-in-Progress (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (intermediate consumption). Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Sub kategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM dan Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Lap. Keuangan Perusahaan, BEI dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan Indonesia Crude Price (ICP), harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2. Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencarian (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyarinaan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. NTB atas dasar harga konstan 2010 didapat dengan menggunakan cara yang sama seperti pada subsektor pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

3. Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Sub kategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subsektor ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan. Sementara itu PDRB triwulan di estimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi.

2.3 INDUSTRI PENGOLAHAN

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

1. Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi; Mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19

2. Industri Makanan dan Minuman Industri Makanan dan Minuman merupakan gabungan dari dua golongan pokok, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur. dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.
3. Industri Pengolahan Tembakau; Pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Sub kategori ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki; Golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman; Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.
7. Industri Kertas & Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam; Subsektor ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekam. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan uta-

ma. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional; Golongan pokok ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.
9. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik; Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.
10. Industri Barang Galian Bukan Logam; Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.
11. Industri Logam Dasar; Golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24
12. Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik; Golongan ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.
13. Industri Mesin dan Perlengkapan; Kegiatan yang tercakup dalam golongan pokok Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya. yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan

komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

14. Industri Alat Angkutan; Golongan pokok ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009 : kode 29 dan 30
15. Industri Furnitur; Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31
16. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Sub kategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Sub kategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Golongan pokok ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Sub kategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri, BPS Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi, BPS dengan kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran, BPS; sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas, BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri, BPS; Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS; Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK, BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP BPS RI.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendeka-

tan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan. Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan sub kategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

Kategori D mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

1. Ketenagalistrikan; Golongan ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri. Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB. Sumber data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Penilaian PDB listrik menggunakan harga dasar, sementara penilaian PDRB listrik menggunakan harga produsen. Harga produsen didapat dengan mengalikan kuantum listrik terjual dengan harga jual tersubsidi. Sementara harga dasar diestimasi dari harga produsen ditambahkan dengan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dan dikurangi pajak.

2. Pengadaan Gas dan Produksi Es; Golongan ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/ Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Golongan ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas. Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode Penghitungan dan Sumber Data

Metode penghitungan yang digunakan untuk seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB. Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode Penghitungan dan Sumber Data

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 sama dengan seri 2000 dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar

kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD. Sumber Data: untuk data Produksi adalah Subdit. Statistik Pertambangan dan Energi - BPS, APBD (Kemenkeu); data Output Sampah diperoleh dari Subdit. Statistik IBS - BPS; Data Harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS RI; Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih – BPS.

2.6 KONSTRUKSI

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode Penghitungan dan Sumber Data

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku sektor konstruksi adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara input antara didapat dengan menggunakan metode commodity flow beberapa komoditas utama dari input antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor-BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor-BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangu-

nan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar-BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi-BPS.

2.7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

1. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Sub kategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Sub kategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub kategori ini.

Metode Penghitungan dan Sumber Data

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkut yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "commodity flow approach". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai

tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya, nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS RI.

2.8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

1. Angkutan Rel ; Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.
2. Angkutan Darat; Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan charter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkutan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat go public dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

3. Angkutan Laut; Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan go public angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.
4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia Ferry.
5. Angkutan Udara; Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut. Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan

nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

6. Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir; Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan go public. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhandha Ghara Rekha, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan go public dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

1. Penyediaan Akomodasi; Sub kategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan. NTB sub kategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi. Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2. Penyediaan Makan dan Minum; Kegiatan sub kategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran self service atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 - BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi - BPS.

2.10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup

kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS RI, perusahaan go public dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat perfilman Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kememparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi go public seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

1. Jasa Perantara Keuangan; Kegiatan yang dicakup didalam Jasa Perantara Keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/ menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendis-konto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan

atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2. Asuransi dan Dana Pensiun; Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang. Asuransi dan Reasuransi, Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil underwriting, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI. Dana Pensiun, Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.
3. Jasa Keuangan Lainnya; Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan leasing, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya. Pegadaian, Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasar-

kan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Pembiayaan, Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk finance lease untuk digunakan oleh penyewa (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Modal Ventura. Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyerahan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

4. Jasa Penunjang Keuangan; Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI).

Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Wali Amanat

Wali amanat (trustee) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (money changer) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.12 REAL ESTAT

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estate adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 JASA PERUSAHAAN

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Jasa Periklanan

Jasa periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.14 ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemer-

intahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), Badan Pusat Statistik; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 JASA PENDIDIKAN

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasi-

onal (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17 JASA LAINNYA

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/ indeks indikator produksi yang sesuai. Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang Dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk Jasa Lainnya diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum. Sumber data yang diperlukan berasal dari data penunjang intern BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T di KBLI 2009, mencakup kegiatan yang memanfaatkan Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (di dalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Untuk kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, (pertanian, industri, konstruksi, penggalian) output dan NTB berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdit PEK (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang Dilakukam Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Customs Organization(WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development(OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries(OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Statistik Harga Konsumen.



<http://jakarta.bps.go.id>

TINJAUAN EKONOMI *Bab 3*

PROVINSI DKI JAKARTA

Selama tahun 2010 hingga 2014 rata-rata besaran PDRB atas dasar harga berlaku yang tercipta per tahun di DKI Jakarta adalah Rp 1 395,5 triliun. Bila dibandingkan dengan total PDRB seluruh Indonesia, nilai ini berada pada kisaran 16 persen terhadap total PDRB provinsi se-Indonesia. Dengan kontribusi yang sebesar ini dapat dikatakan perkembangan perekonomian Jakarta akan cukup mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Bila 17 lapangan usaha dikelompokkan menjadi 3 sektor utama, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier, maka terlihat lapangan usaha yang masuk sektor tersier masih menjadi andalan dengan rata-rata kontribusi 71,70 persen selama tahun 2010-2014. Setelah itu diikuti oleh sektor sekunder dan primer dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 27,91 persen dan 0,39 persen.

Lapangan usaha yang termasuk dalam kelompok sektor tersier adalah lapangan usaha Perdagangan, Pengangkutan, Komunikasi, Jasa Keuangan, Non Keuangan dan Jasa-jasa lainnya. Sementara yang masuk dalam kategori sektor sekunder adalah lapangan usaha Industri Pengolahan, Listrik, Gas, Air Bersih dan Konstruksi, dan yang termasuk sektor primer adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan. Struktur yang demikian membuat perekonomian Jakarta masih berpotensi untuk berkembang lebih luas dan tumbuh lebih cepat sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi dan gaya hidup masyarakat Jakarta.

Tabel 3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (Miliar Rupiah), 2010-2014

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 275,6	1 391,2	1 488,3	1 617,7	1 710,6
B	Pertambangan dan Pengalihan	2 903,9	3 731,2	4 011,4	4 288,0	4 541,0
C	Industri Pengolahan	152 651,1	170 047,9	188 822,1	209 779,3	239 596,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3 288,5	4 365,3	5 150,9	5 094,2	5 580,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	549,0	579,5	611,5	654,9	705,3
F	Konstruksi	150 719,7	169 904,4	188 935,1	210 651,1	234 183,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	180 815,1	207 488,9	224 376,0	261 099,6	304 655,2
H	Transportasi dan Pergudangan	29 857,3	33 836,3	37 475,3	44 161,7	54 847,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53 859,9	61 561,7	69 531,5	79 770,1	92 373,8
J	Informasi dan Komunikasi	80 971,3	91 084,2	102 750,3	115 909,5	128 385,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	110 704,2	120 814,8	143 347,9	163 028,3	178 998,1
L	Real Estat	74 400,1	83 387,7	90 062,0	98 684,1	111 672,0
M,N	Jasa Perusahaan	72 937,2	83 570,8	93 199,6	105 903,8	122 924,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	55 242,9	72 888,8	83 862,8	89 312,0	98 085,0
P	Jasa Pendidikan	55 243,4	61 505,9	69 871,2	79 619,4	92 477,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16 408,3	18 987,0	21 759,6	25 065,3	28 887,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	33 356,0	39 073,0	44 177,3	52 398,6	61 783,4
Produk Domestik Regional Bruto		1 075 183,5	1 224 218,5	1 369 432,6	1 547 037,8	1 761 407,1

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tinjauan lebih lengkap mengenai perekonomian DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2014 akan diuraikan sebagaimana berikut:

3.1 STRUKTUR EKONOMI

Ditinjau menurut kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB DKI Jakarta, tiga lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB DKI Jakarta adalah Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan kendaraan bermotor, lapangan usaha industri pengolahan, dan lapangan usaha konstruksi. Ketiganya memberi kontribusi sekitar 44 persen terhadap total PDRB DKI Jakarta.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar dengan nilai kontribusi sebesar 17,30 persen pada tahun 2014. Nilai ini lebih besar dari yang diberikan pada tahun 2012 yang sebesar 16,38 persen dan tahun 2010 yang sebesar 16,82 persen.

Berikutnya adalah lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,6 persen. Kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini pada tahun 2014 lebih rendah dari yang dicapai pada tahun 2012 yang sebesar 13,79 persen dan dari tahun 2010 yang sebesar 14,2 persen. Kontribusi terbesar berikutnya diberikan oleh lapangan usaha konstruksi. Sama halnya dengan lapangan usaha industri pengolahan, kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha konstruksi juga cenderung mengalami penurunan. Bila pada tahun 2010 lapangan usaha ini memberi kontribusi 14,02 persen maka pada tahun 2012 kontribusinya berkurang menjadi 13,80 persen dan pada tahun 2014 kembali berkurang menjadi 13,30 persen.

Penurunan kontribusi lapangan usaha industri pengolahan dan konstruksi tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha jasa seperti lapangan usaha jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 3.2.

Hal ini menunjukkan bagaimana perekonomian DKI Jakarta secara perlahan mulai bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier. Sebagai contoh, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan komunikasi yang kontribusinya terus bertambah dari sebesar 5,01 persen di tahun 2010 menjadi 5,08 persen di tahun 2012 dan 5,24 persen di tahun 2014.

Demikian pula dengan lapangan usaha jasa perusahaan dan jasa lainnya. Kontribusi lapangan usaha jasa perusahaan mengalami peningkatan kontribusi dari 6,78 persen di tahun 2010 menjadi 6,81 persen di tahun 2012 dan 6,98 persen di tahun 2014. Sementara lapangan usaha jasa lainnya mengalami peningkatan kontribusi dari 3,10 persen di tahun 2010 menjadi 3,23 persen di tahun 2012 dan 3,51 persen di tahun 2014.

Tabel 3.2 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2010-2014 (Persen)

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,30	0,29	0,28	0,26
C	Industri Pengolahan	14,20	13,89	13,79	13,56	13,60
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,31	0,36	0,38	0,33	0,32
E	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	14,02	13,88	13,80	13,62	13,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	16,82	16,95	16,38	16,88	17,30
H	Transportasi dan Pergudangan	2,78	2,76	2,74	2,85	3,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,01	5,03	5,08	5,16	5,24
J	Informasi dan Komunikasi	7,53	7,44	7,50	7,49	7,29
K	Jasa Keuangan	10,30	9,87	10,47	10,54	10,16
L	Real Estate	6,92	6,81	6,58	6,38	6,34
M,N	Jasa Perusahaan	6,78	6,83	6,81	6,85	6,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5,14	5,95	6,12	5,77	5,57
P	Jasa Pendidikan	5,14	5,02	5,10	5,15	5,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,55	1,59	1,62	1,64
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,10	3,19	3,23	3,39	3,51
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi perekonomian global selama lima tahun terakhir (periode tahun 2010 hingga 2014) masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti semenjak krisis keuangan global yang mulai terjadi pada pertengahan 2008. Krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat dan Eropa telah mempengaruhi perekonomian negara-negara lainnya. Memburuknya performa perekonomian sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia, dan Jakarta, berimbas pada memburuknya performa kinerja perekonomian Indonesia. Bagi Jakarta imbas dari krisis tersebut mulai dirasakan pada akhir 2011. Pada triwulan akhir 2011 ekspor Jakarta mulai menunjukkan perlambatan, namun demikian perekonomian Jakarta masih mampu tumbuh 6,73 persen.

Memasuki tahun 2012 kondisi perekonomian negara-negara Zona Eropa belum menunjukkan perbaikan. Perekonomian di Zona ini masih menunjukkan kontraksi karena krisis hutang fiskal. Hal ini yang menyebabkan permintaan negara-negara Eropa menurun sehingga berimbas pada menurunnya harga komoditas dunia. Kondisi ini diperparah oleh pemulihan perekonomian Amerika Serikat juga belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Amerika Serikat sendiri masih berlutut dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, rapuhnya sektor keuangan, dan menurunnya kepercayaan pasar.

Memburuknya perekonomian di negara-negara maju tersebut berdampak pula pada performa negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. China dan India turut mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Demikian pula dengan Jepang yang saat itu masih berusaha pulih dari bencana gempa dan tsunami yang melanda di tahun 2011. Kinerja perekonomian yang melambat di negara-negara tersebut turut mempengaruhi perekonomian Indonesia dan Jakarta. Ekspor produk menjadi sektor yang paling merasakan dampak krisis global sehingga perekonomian Jakarta tertahan lajunya pada level 6,53 persen.

Pada tahun 2013 kondisi perekonomian global tidak lebih baik dari yang dialami pada tahun 2012. Bahkan bisa dikatakan lebih buruk dari tahun 2012. Sejumlah peristiwa penting terjadi yang berimbas pada perekonomian global, diantaranya adalah melemahnya harga perdagangan beberapa komoditas di pasar dunia, government shutdown yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, hingga issue kebijakan fiskal dan moneter yang akan dikeluarkan oleh The Fed berimbas pada melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing, terutama dolar Amerika. Namun demikian pelemahan nilai tukar ini tidak cukup ampuh untuk mendorong ekspor luar negeri Indonesia karena belum pulihnya permintaan di negara-negara maju. Sebagai akibatnya ekspor kembali tumbuh lebih lambat dari tahun sebelumnya yang menyebabkan perlambatan pula pada produksi sektor riil. Sebagai konsekuensinya ekonomi kembali tumbuh lebih lambat. DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan 6,11 persen pada tahun ini.

Pada tahun 2014 ekonomi Jakarta tumbuh 5,95 persen, angka ini lebih lambat dari yang dicapai pada tahun 2013. Dari sisi eksternal ketidakpastian konsisi perekonomian global masih membayangi. Meskipun Amerika Serikat perlahan mulai pulih dari krisis, namun krisis yang terjadi di zona eropa masih membayangi perkembangan ekonomi global. Seain itu ditambah dengan perlambatan ekonomi yang dialami sejumlah negara besar di Asia, seperti Tiongkok, India, dan Jepang. Hal ini yang kemudian menahan laju ekspor produk ke luar negeri. Dari sisi internal, tingginya angka inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL) serta tekanan pada nilai tukar berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Sebagai lanjutannya permintaan akan barang dan jasa juga mengalami perlambatan. Tingginya kurs tukar rupiah yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor, nyatanya juga memberi tekanan pada sektor industri karena tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku ataupun barang modal.

Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi Indonesia. Pesta Demokrasi diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan presiden. Ditengah ketidakpastian perekonomian global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, pemilu menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia dan Jakarta. Permintaan domestik (terutama jasa-jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu) karena pelaksanaan Pemilu sedikit banyak membantu Indonesia melalui dampak krisis keuangan global yang masih belum berakhir. Demikian pula dengan Jakarta. Momen ini sedikit banyak membantu menjaga pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap berada pada level 5,95 persen.

Tinjauan terhadap sub lapangan usaha menunjukkan, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh 13,72 persen setelah pada tahun sebelumnya lapangan usaha ini tumbuh 7,02 persen. Tingginya pertumbuhan pada lapangan usaha ini selain karena didorong oleh kinerja sub lapangan usaha angkutan darat dan sub lapangan usaha jasa penunjang angkutan juga didorong oleh peningkatan kinerja sub lapangan usaha angkutan udara. Pembukaan bandara Halim Perdanakusumah sebagai bandara komersial mendorong terjadinya peningkatan nilai tambah pada sektor ini. Pertumbuhan tertinggi kedua dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh 11,08 persen. Setelah itu diikuti oleh lapangan usaha jasa perusahaan yang tumbuh 8,95 persen.

Sementara itu tiga lapangan usaha utama di Jakarta masing-masing tumbuh sebesar 4,95 persen untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor, sebesar 5,53 persen untuk lapangan usaha industri pengolahan, dan sebesar 4,68 persen untuk lapangan usaha konstruksi.belum datang

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2014

Lapangan Usaha		2011	2012	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,13	3,29	1,93	0,73
B	Pertambangan dan Penggalian	4,32	-0,66	-0,22	-0,86
C	Industri Pengolahan	2,35	2,41	5,49	5,53
D	Pengadaan Listrik, Gas	5,15	5,34	1,00	1,76
E	Pengadaan Air	2,93	4,15	3,68	3,75
F	Konstruksi	6,33	5,42	6,06	4,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	7,16	6,81	5,35	4,95
H	Transportasi dan Pergudangan	7,45	6,93	7,08	13,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,00	6,30	6,45	5,80
J	Informasi dan Komunikasi	12,06	13,75	12,15	11,08
K	Jasa Keuangan	3,55	9,40	7,76	4,54
L	Real Estate	6,67	6,72	5,07	4,96
M,N	Jasa Perusahaan	7,57	6,95	8,24	8,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	11,87	1,38	-2,86	1,21
P	Jasa Pendidikan	6,23	6,03	3,55	3,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,28	8,45	5,77	6,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	13,31	8,73	7,58	8,47
Produk Domestik Regional Bruto		6,73	6,53	6,11	5,95

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.3 PDRB PER KAPITA

PDRB per kapita diturunkan dari nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah pada suatau waktu tertentu. Pada tahun 2014, PDRB per kapita DKI Jakarta mencapai 174,8 juta rupiah, meningkat cepat bila dibandingkan tahun 2010 yang senilai Rp.111,53 juta rupiah. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama tahun 2010-2014 adalah 11,90 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 12,67 persen. Sementara pada tahun 2014, PDRB per kapita atas harga konstan tumbuh 4,84 persen.

Tabel 3.4 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha, 2010-2014 (Juta Rupiah)

PDRB per Kapita	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai (juta Rp)	Laju (%)	Nilai (juta Rp)	Laju (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	111,53	—	111,53	—
2011	125,53	12,56	117,67	5,51
2012	138,86	10,61	123,96	5,34
2013*	155,17	11,75	130,11	4,96
2014**	174,82	12,67	136,41	4,84

* Angka sementara

** Angka sangat sementara



<http://jakarta.bps.go.id>

PERKEMBANGAN PDRB MENURUT *Bab 4* LAPANGAN USAHA

PDRB Provinsi DKI Jakarta menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha yang kemudian dirinci lagi menjadi sublapangan usaha. Pemecahan menjadi subkategori atau sublapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

4.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)

Lapangan usaha ini mencakup Sublapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Kemudian sublapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sublapangan Usaha Perikanan.

Kontribusi lapangan usaha ini selama periode 2010 hingga 2014 menunjukkan trend penurunan. Bila pada tahun 2010 lapangan usaha ini berkontribusi 0,12 persen, maka pada tahun 2012 kontribusinya turun menjadi 0,11 persen dan pada tahun 2014 kontribusinya kembali turun menjadi 0,10 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara bila ditinjau lebih dalam, kontribusi yang diberikan oleh setiap sub lapangan terhadap pembentukan Nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan Sublapangan usaha tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar. Pada tahun 2014 sub lapangan usaha ini berkontribusi 59,09 persen dari nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Nilai ini juga lebih kecil dari yang diberikan pada tahun 2010 yang sebesar 60,12 persen dan sebesar 59,65 persen pada tahun 2012.

Tabel 4.1 Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen), 2010-2014

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	60,12	60,21	59,65	59,46	59,09
a. Tanaman Pangan	1,70	1,59	1,65	1,63	1,59
b. Tanaman Hortikultura Semusim	2,26	2,27	2,23	2,18	2,15
c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	50,30	50,32	50,10	49,81	49,46
f. Peternakan	5,12	5,28	4,90	5,00	5,05
2. Perikanan	39,88	39,79	40,35	40,54	40,91
3. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari sisi laju pertumbuhan, selama periode 2011 hingga 2014 pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cukup berfluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2012 yang sebesar 3,29 persen. Tingginya pertumbuhan pada tahun ini didorong oleh pertumbuhan sub lapangan usaha perikanan yang mencapai 5,84 persen dan sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian yang sebesar 1,66 persen. Sementara pada tahun 2014 lapangan usaha ini mencatat perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 0,73 persen. Hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan sub lapangan usaha perikanan yang sebesar 1,18 persen dan kontraksi yang dialami oleh sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian yang sebesar minus 0,04 persen.

Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen), 2011-2014



4.2 Pertambangan dan Penggalian (B)

Nilai tambah Pertambangan dan Penggalian selama kurun waktu 2010-2014 rata-rata mencapai Rp. 3,90 triliun.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian di DKI Jakarta hanya memiliki satu sub lapangan usaha, yakni sub lapangan usaha Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi. Selama periode 2010 hingga 2014 kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini menunjukkan trend penurunan.

Pada tahun 2014 kontribusi lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB DKI Jakarta adalah 0,26 persen. Sebelumnya lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 0,29 persen pada tahun 2012 dan 0,3 persen pada tahun 2011.

Tabel 4.2 Peranan Lapangan usaha Terhadap PDRB Pertambangan dan Penggalian (Persen)
2010-2014

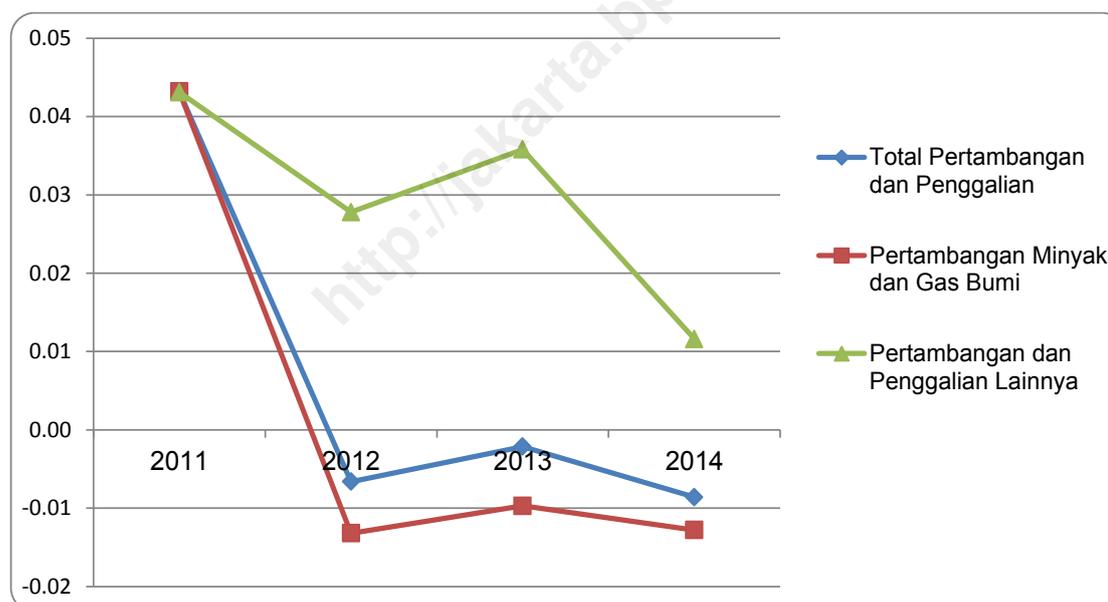
Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	83,96	86,51	86,99	87,28	87,08
2. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	16,04	13,49	13,01	12,72	12,92
Pertambangan dan Penggalian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian selama tahun 2010 hingga 2014, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 4.2, menunjukkan hanya pada tahun 2011 lapangan usaha ini mampu tumbuh di atas nol persen (4,32 persen). Selanjutnya selama tahun 2011 hingga 2014 pertumbuhannya selalu di bawah nol persen, dengan kontraksi terbesar terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar minus 0,86 persen.

Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Pertambangan dan Penggalian (Persen)
2011-2014



4.3 Industri Pengolahan (C)

Lapangan usaha ini mencakup 16 sublapangan usaha Industri Pengolahan, mulai dari Sublapangan Industri Batubara dan Pengilangan Migas sampai dengan Industri Pengolahan lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Nilai tambah Industri pengolahan kurun waktu 2010-2014 rata-rata mencapai Rp. 192,18 triliun dengan kontribusi mencapai 13,8 persen dari PDRB DKI Jakarta. Pada Industri Pengolahan, Lapangan usaha yang memiliki peranan terbesar adalah industri alat angkut yaitu sebesar 56,9 persen pada tahun 2014 dari

seluruh nilai tambah industri pengolahan, kemudian diikuti oleh industri kimia, farmasi dan obat tradisional dan Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik yaitu sebesar 12,8 persen dan 6,8 persen. Sedangkan peranan lapangan usaha lain berturut-turut dari yang terbesar hingga terkecil adalah lapangan usaha Industri makanan dan minuman 6,0 persen, industri tekstil dan pakaian jadi 5,5 persen, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 3,1 persen, Industri Logam dasar 3,0 persen, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 2,1 persen, Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan 1,2 persen, Industri Furnitur 1,1 persen, Industri Barang Galian bukan Logam 1,0 persen. sedangkan peranan lapangan usaha yang dibawah 1,0 persen berturut-turut dari yang terbesar hingga terkecil adalah Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 0,2 persen, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 0,1 persen, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0,1 persen.

Tabel 4.3 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Industri Pengolahan (persen), 2010-2014

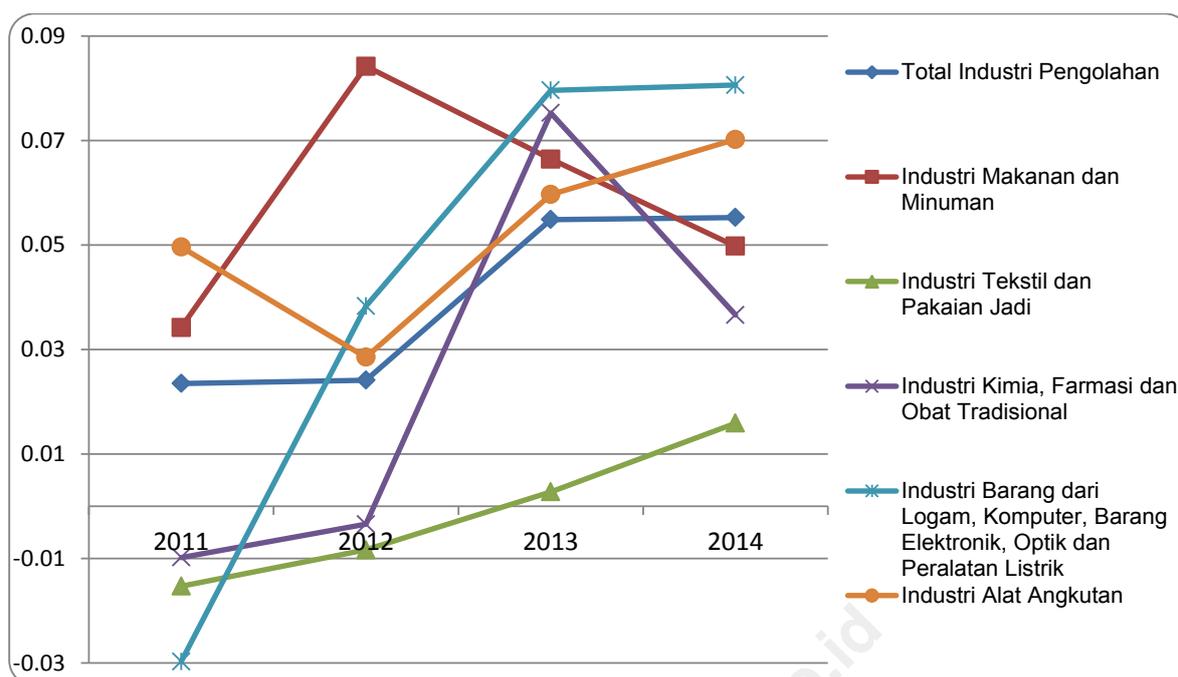
Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
2 Industri Makanan dan Minuman	5,85	5,72	5,90	6,03	6,00
3 Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	6,42	6,18	5,96	5,81	5,51
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3,17	3,21	3,15	3,15	3,12
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	14,50	14,05	13,86	13,75	12,82
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2,44	2,32	2,14	2,24	2,10
10 Industri Barang Galian bukan Logam	1,07	1,04	1,03	1,07	0,99
11 Industri Logam Dasar	3,38	3,19	3,21	3,15	3,00
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	7,27	6,86	6,87	7,14	6,81
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,15	0,16	0,15	0,15	0,14
14 Industri Alat Angkutan	53,30	54,76	55,15	54,89	56,90
15 Industri Furnitur	1,00	1,04	1,06	1,08	1,06
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1,06	1,09	1,17	1,19	1,21
Industri Pengolahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2014 adalah sebesar 5,53 persen, sedangkan lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik yaitu sebesar 8,06 persen pada tahun 2014 kemudian diikuti oleh industri alat angkutan, terutama ditopang produksi mobil yaitu sebesar 7,02 persen, Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 4,98 persen, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 3,66 persen dan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 1,59 persen.

Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (Persen), 2011-2014



4.4 Pengadaan Listrik dan Gas (D)

Nilai tambah sektor pengadaan listrik dan gas kurun waktu 2010-2014 mencapai Rp. 23,48 triliun dengan kontribusi mencapai 0,34 persen dari PDRB DKI Jakarta. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,32 persen terhadap perekonomian provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014. Dari kontribusi tersebut, sebanyak 71,81 persennya disumbangkan oleh lapangan usaha Pengadaan Gas dan produksi Es dan Ketenagalistrikan sebesar 28,19 persen.

Tabel 4.4 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Pengadaan Listrik dan gas (Persen), 2010-2014

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ketenagalistrikan	35,94	30,44	27,90	27,17	28,19
Pengadaan Gas dan Produksi Es	64,06	69,56	72,10	72,83	71,81
Sektor Pengadaan Listrik, Gas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

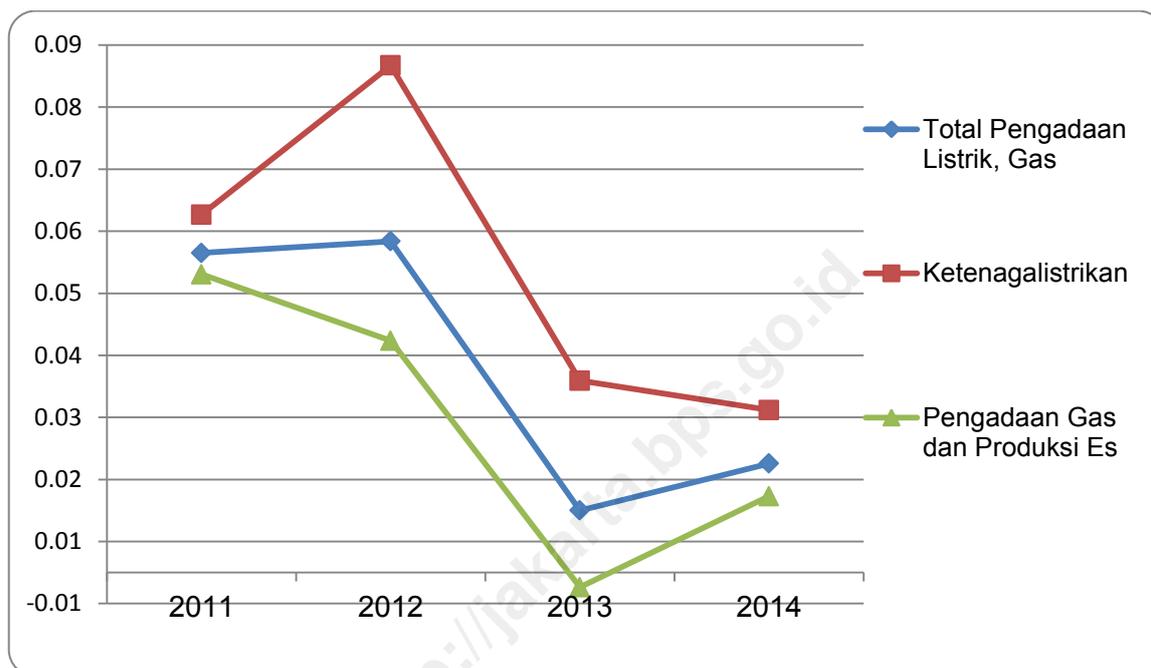
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2014 adalah sebesar 15,64 persen. Masing-masing lapangan usaha juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, di mana lapangan usaha Ketenagalistrikan sebesar 12,75 persen dan Pengadaan Gas dan Produksi Es sebesar 24,46 persen.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2014 adalah sebesar 1,76 persen. Masing-masing subkategori lapangan usaha juga mencatatkan pertumbuhan dimana lapangan usaha Ketenagalistrikan sebesar 2,62 persen dan Pengadaan Gas dan Produksi Es sebesar 1,23 persen. Langkah kenaikan tarif tenaga listrik merupakan salah satu usaha menekan subsidi energy tahun 2014. Sedangkan pertumbuhan subsektor gas di Jakarta terus meningkat 1 tahun terakhir dengan capaian pertumbuhan 1,23 persen lebih rendah dibanding pertumbuhan subsektor listrik yang mencapai 2,62 persen. Kenaikan tariff listrik ini akibat dicabutnya subsidi Negara untuk subsektor ini.

Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan PDRB Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2011-2014 (persen)



4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)

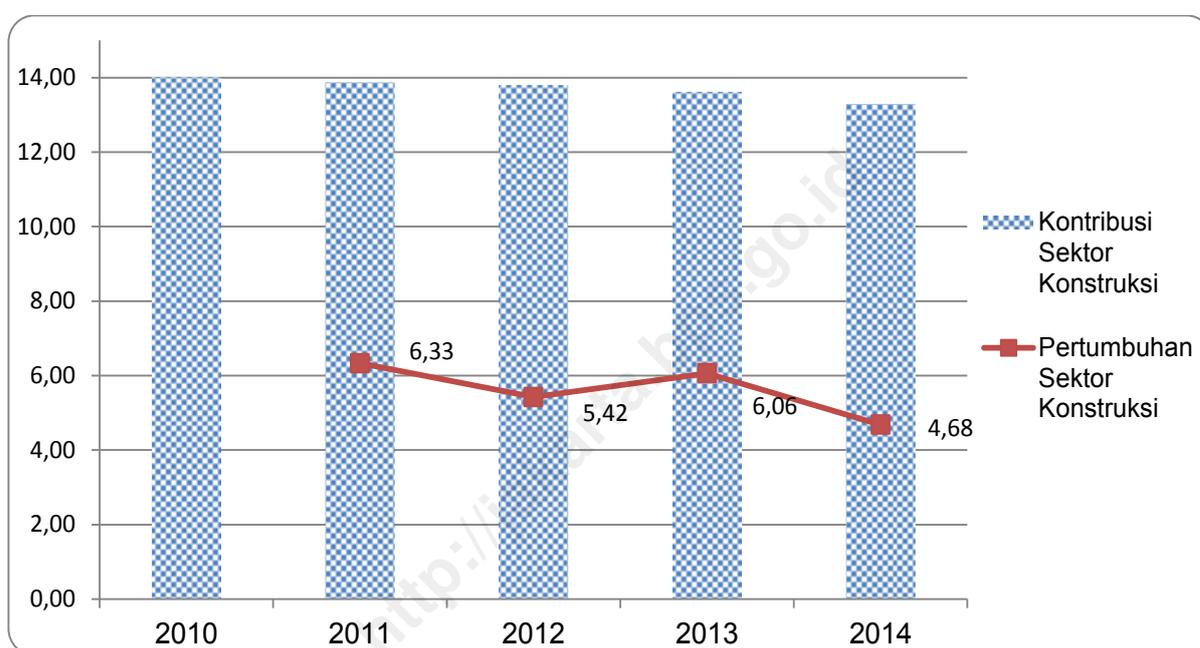
Nilai tambah Pengadaan air kurun waktu 2010-2014 rata-rata mencapai Rp. 620,06 miliar dengan kontribusi yang tergolong kecil yaitu mencapai 0,04 persen dari PDRB DKI Jakarta. Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di provinsi DKI Jakarta selama tahun 2010-2014 hampir tidak bergerak pada angka kisaran 0,05 persen. Sementara laju pertumbuhannya selalu di atas 2,5 persen, yaitu sebesar 4,71 persen, 2,93 persen, 4,15 persen, 3,68 persen, dan 3,75 persen berturut-turut untuk tahun 2010-2014.

4.6 Konstruksi (F)

Lapangan usaha konstruksi menjadi salah satu lapangan usaha andalan bagi DKI Jakarta. Rata-rata nilai tambah yang diciptakan oleh lapangan usaha konstruksi per tahun selama periode tersebut adalah sebesar Rp 190,88 triliun, atau sekitar 13,72 persen dari PDRB DKI Jakarta. Bila dicermati perkembangan dari tahun ke tahun kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini terhadap PDRB DKI Jakarta cenderung untuk mengalami penurunan. Namun demikian, nilainya masih di atas 13 persen. Bila pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 14,02 persen, pada tahun 2012 dan 2014 kontribusinya berkurang menjadi 13,80 persen dan 13,30 persen. Laju pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha konstruksi selama tahun 2010 – 2014 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2014 lapangan usaha ini tumbuh 4,68 persen, lebih rendah dari tahun 2013 yang sebesar 6,06 persen dan tahun 2012 yang sebesar 5,42 persen.

Gambar 4.5 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Konstruksi (Persen), 2010-2014



4.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)

Lapangan usaha ini terdiri dari sub lapangan usaha Perdagangan Mobil, sepeda motor dan reparasinya dan sub lapangan usaha perdagangan besar dan eceran selain kendaraan bermotor. Lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha dengan nilai tambah terbesar di DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2010 hingga 2014 rata-rata nilai tambah yang tercipta di lapangan usaha ini adalah Rp 235,69 triliun per tahun atau sekitar 16,86 persen dari PDRB DKI Jakarta.

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 16 persen. Pada tahun 2014, kontribusi kategori ini sebesar 17,30 persen terhadap total perekonomian Provinsi DKI Jakarta, dengan sebesar 2,97 persen (17,17 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Sedangkan sebesar 14,33 persen (82,83 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

Tabel 4.5 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2010-2014

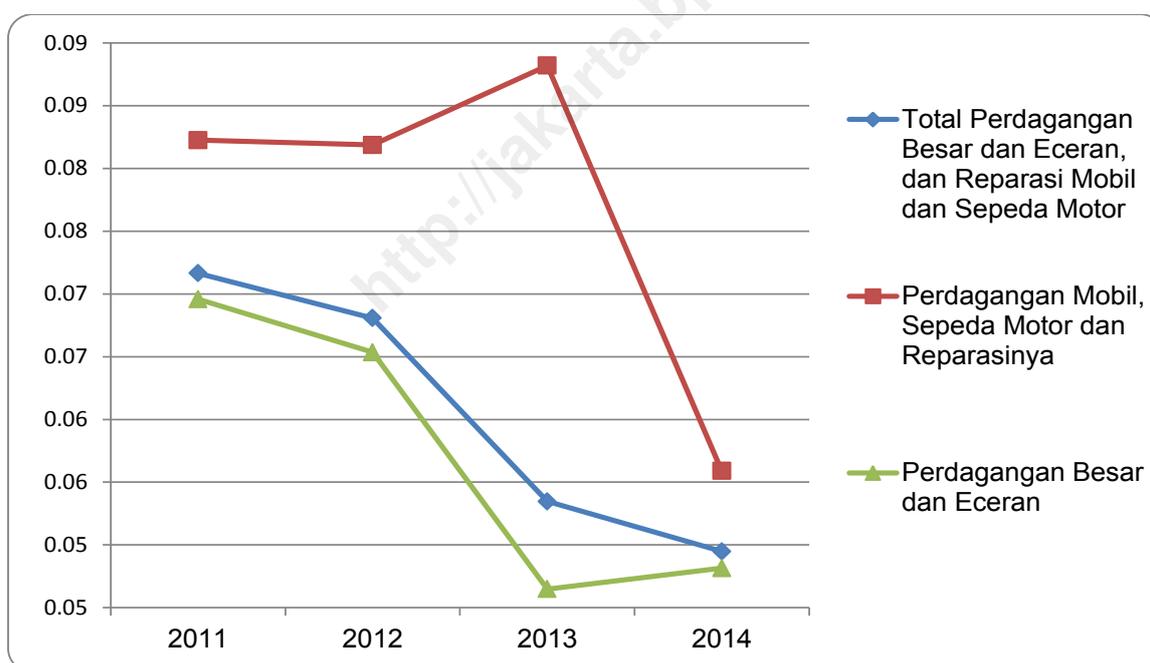
Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	16,38	16,34	16,92	17,39	17,17
Perdagangan Besar dan Eceran	83,62	83,66	83,08	82,61	82,83
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tingginya transaksi perdagangan di DKI Jakarta rata-rata 5 tahun terakhir mampu memberikan pertumbuhan 5,97 persen. Namun demikian pada tahun 2014 pertumbuhan mampu tumbuh 4,95 persen lebih rendah dari capaian pertumbuhan di tahun 2013 yaitu 5,35 persen. Pertumbuhan Penjualan mobil dan Sepeda motor mengalami penurunan sepanjang tahun 2014 hanya tumbuh 5,59 persen, turun jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 8,82 persen.

Gambar 4.6 Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2011-2014



4.8. Transportasi dan Pergudangan (H)

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan terdiri atas sub lapangan usaha angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Nilai tambah yang tercipta dari lapangan usaha ini selama kurun waktu tahun 2010 – 2014 rata-rata mencapai Rp 40,04 triliun per tahun, atau sekitar 2,85 persen dari PDRB DKI Jakarta.

Bila ditinjau menurut sub lapangan usaha, kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah lapangan usaha transportasi dan pergudangan diberikan oleh sub lapangan usaha angkutan darat (dengan kontribusi antara 46 hingga 48 persen), setelah itu diikuti oleh sub lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir (dengan kontribusi antara 35 hingga 38 persen) dan sub lapangan usaha angkutan laut (dengan kontribusi antara 11 hingga 14 persen).

Pada tahun 2014, sub lapangan usaha angkutan darat berkontribusi 46,5 persen terhadap pembentukan nilai tambah lapangan usaha transportasi dan pergudangan, sedangkan sub lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir dan sub lapangan usaha angkutan laut masing-masing berkontribusi 35,1 persen dan 11,2 persen). Satu hal yang menarik adalah peningkatan kontribusi yang ditunjukkan oleh sub lapangan usaha angkutan udara. Bila pada tahun-tahun sebelumnya sub lapangan usaha ini hanya berkontribusi kurang dari 1 persen, pada tahun 2014 kontribusinya meningkat menjadi 6,1 persen. Peningkatan ini didorong oleh dibukanya kembali bandara Halim Perdana Kusuma sebagai bandara komersial.

Tabel 4.6 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2010-2014

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Angkutan Rel	1,56	1,35	1,32	1,27	1,11
2 Angkutan Darat	46,96	46,93	46,10	48,54	46,48
3 Angkutan Laut	14,18	13,86	13,87	12,71	11,16
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
5 Angkutan Udara	0,59	0,55	0,51	0,44	6,06
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	36,64	37,24	38,13	36,98	35,14
Transportasi dan Pergudangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

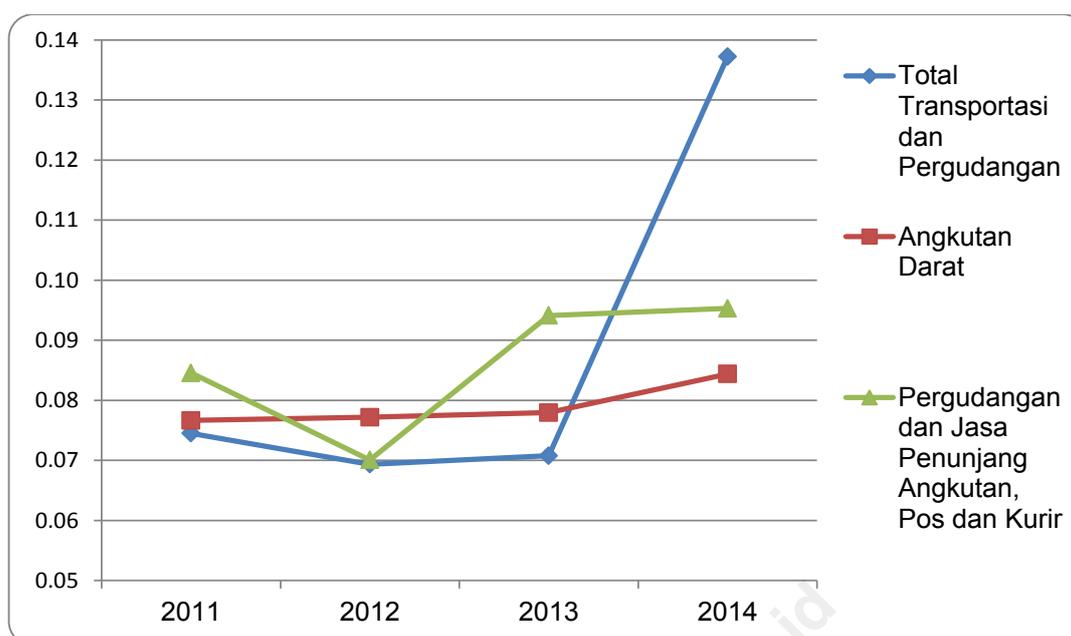
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari sisi laju pertumbuhan, pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2014 yang sebesar 13,72 persen. Nilai ini jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ini selain didorong oleh pertumbuhan sub lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir (9,53 persen) dan sub lapangan usaha angkutan darat (8,44 persen) juga didorong oleh peningkatan yang dicapai oleh sub lapangan usaha angkutan udara yang sebesar 1.328,84 persen.

Sekali lagi peningkatan ini disebabkan oleh dibukanya kembali bandara Halim Perdana Kusuma sebagai bandara komersial yang melayani penerbangan domestik.

Gambar 4.7 Laju Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2011-2014



4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)

Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki dua sub lapangan usaha, yakni sublapangan usaha penyediaan akomodasi dan sub lapangan usaha penyediaan makan minum. Selama kurun waktu 2010-2014 rata-rata nilai tambah per tahun yang tercipta pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan minum adalah sebesar Rp 61,39 triliun. Kontribusi terbesar diberikan oleh sub lapangan usaha penyediaan makan minum yang memberi kontribusi di atas 80 persen terhadap pembentukan nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Kontribusi sublapangan usaha ini pada tahun 2010 adalah 86,13 persen, pada tahun 2012 kontribusinya turun menjadi 84,98 persen, dan pada tahun 2014 kembali turun menjadi 83,21 persen. Ini merupakan implikasi dari peningkatan kontribusi sublapangan usaha penyediaan akomodasi, dari sebesar 13,87 persen pada tahun 2010, menjadi 15,02 persen pada tahun 2012, dan 16,79 persen pada tahun 2014.

Tabel 4.7 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum (Persen), 2010-2014

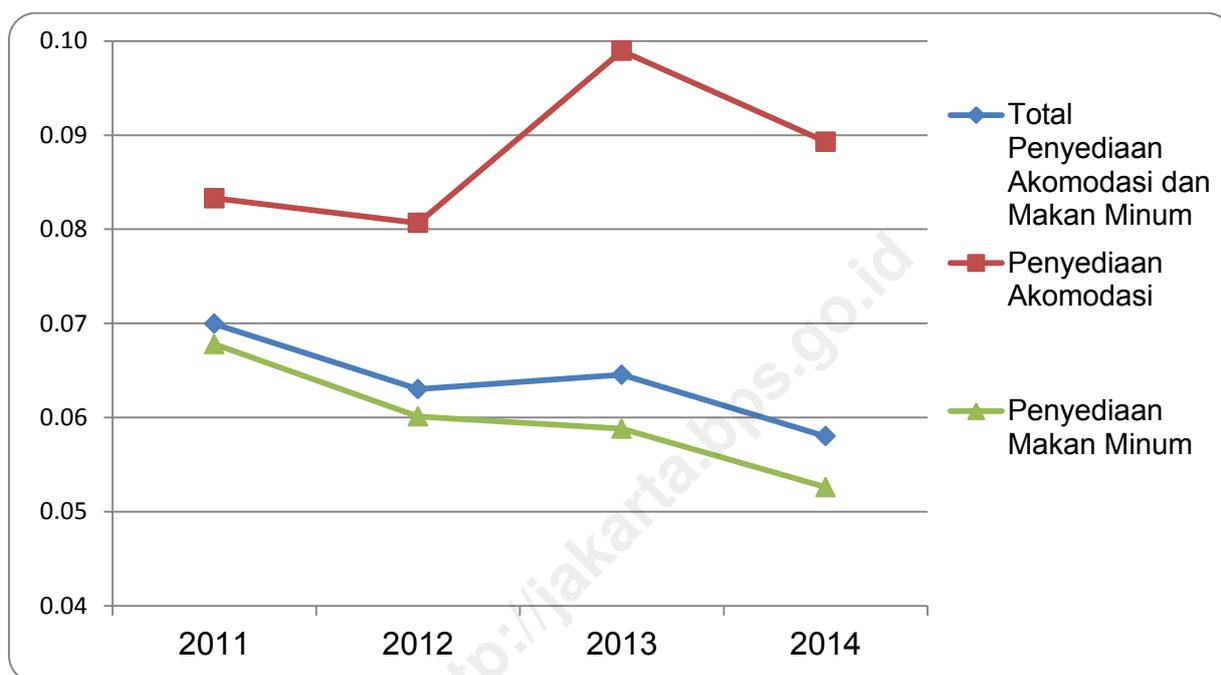
Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Akomodasi	13,87	14,15	15,02	16,60	16,79
Penyediaan Makan Minum	86,13	85,85	84,98	83,40	83,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum selama periode 2008 hingga 2014 menunjukkan pola yang cukup berfluktuatif. Pada tahun 2014 lapangan usaha ini tumbuh 5,26 persen, melambat dari tahun 2013 dan 2012 yang masing-masing sebesar 5,88 persen dan 6,01 persen. Bila ditinjau menurut sub lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sub lapangan usaha penyediaan makan minum yang tumbuh 8,93 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ini pun melambat bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 9,89 persen. Namun masih lebih cepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2012 yang sebesar 8,07 persen.

Gambar 4.8 Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2011-2014

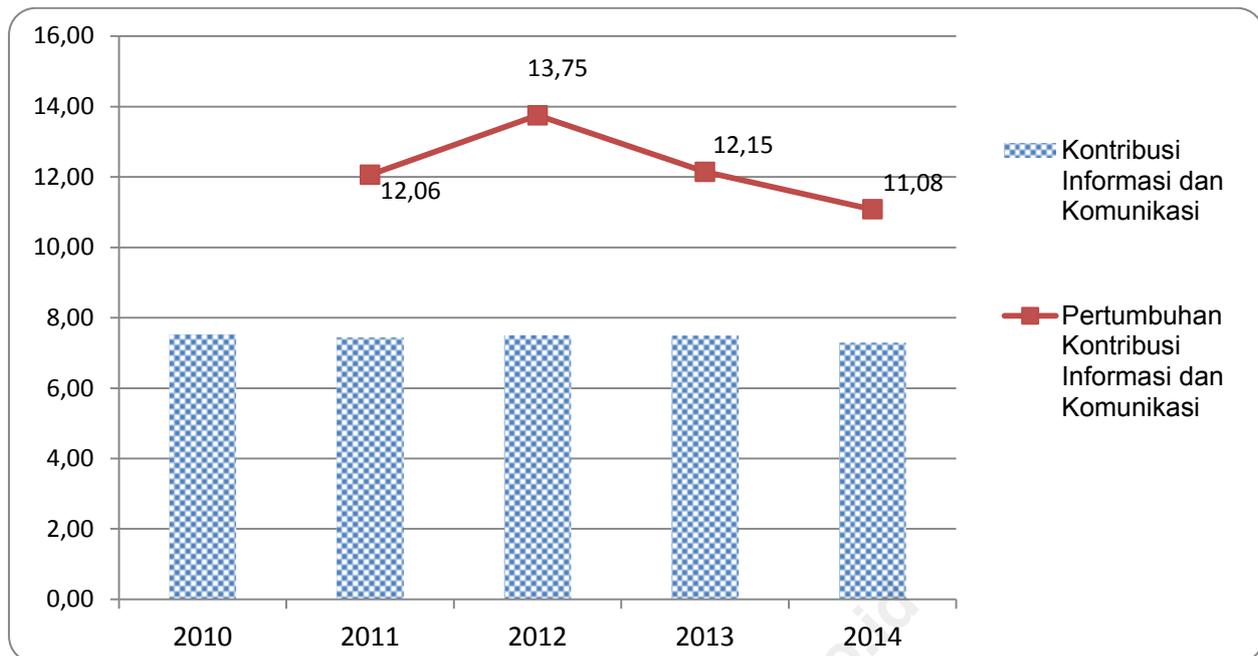


4.10 Informasi dan Komunikasi (J)

Lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peran yang strategis pada era globalisasi saat ini. Kemajuan teknologi yang dicapai oleh lapangan usaha ini turut andil dalam mendorong pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Selama tahun 2010 hingga 2014 rata-rata besarnya nilai tambah lapangan usaha ini adalah Rp 103,28 triliun atau sekitar 7,4 persen dari PDRB DKI Jakarta. Peranan lapangan usaha informasi dan komunikasi selama tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan trend yang menurun. Bila pada tahun 2010 kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini sebesar 7,53 persen, pada tahun 2012 dan 2014 kontribusinya masing-masing turun menjadi 7,50 persen dan 7,29 persen.

Laju pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan yang tertinggi di antara lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2014 lapangan usaha ini tumbuh 11,08 persen, pertumbuhan ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Sebagaimana peranannya, pertumbuhan lapangan usaha ini juga mengalami perlambatan. Pada tahun 2012 dan 2013 lapangan usaha ini tumbuh 13,75 persen dan 12,15 persen.

Gambar 4.9 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Informasi dan Komunikasi (Persen), 2010-2014



4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi (K)

Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi terdiri atas sub lapangan usaha jasa perantara keuangan, sub lapangan usaha asuransi dan dana pensiun, sub lapangan usaha jasa keuangan lainnya, dan sub lapangan usaha jasa penunjang keuangan.

Sepanjang periode tahun 2010 hingga 2014 rata-rata besarnya nilai tambah per tahun lapangan usaha ini adalah Rp 143,38 triliun, atau sekitar 10,27 persen dari total PDRB DKI Jakarta. Bila dilihat struktur dalam lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, kontribusi terbesar terhadap terbentuknya nilai tambah lapangan usaha ini diberikan oleh sub lapangan usaha jasa perantara keuangan. Pada tahun 2010 kontribusi yang diberikan oleh sub lapangan usaha ini sebesar 52,51 persen, kemudian pada tahun 2012 sedikit meningkat menjadi 52,88 persen, dan pada tahun 2014 berkurang menjadi 51,59 persen.

Penurunan ini merupakan pengaruh dari peningkatan kontribusi yang diberikan oleh sub lapangan usaha asuransi dan dana pensiun. Pada tahun 2010 kontribusi yang diberikan sub lapangan usaha ini adalah 32,98 persen dari total nilai tambah lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi. Pada tahun 2012 kontribusinya relatif stabil pada level 32,97 persen, sementara pada tahun 2014 kontribusinya naik menjadi 34,52 persen.

Tabel 4.8 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2010-2014

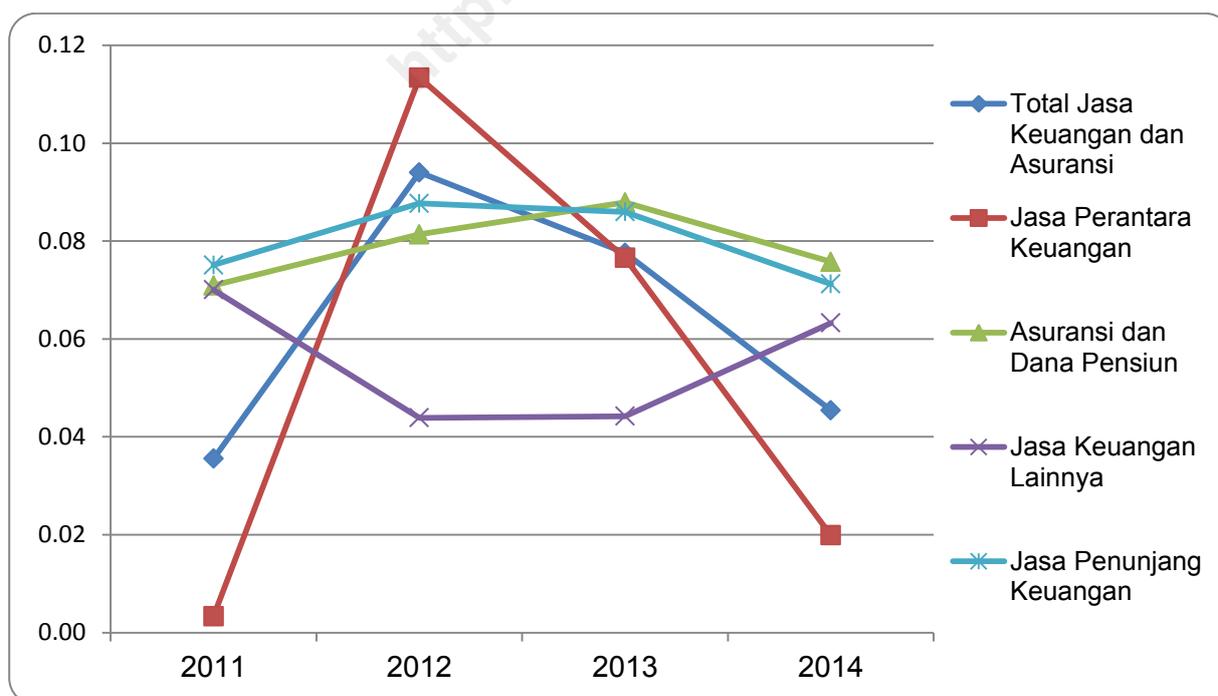
Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Jasa Perantara Keuangan	52,51	50,99	52,88	52,68	51,59
2 Asuransi dan Dana Pensiun	32,98	33,99	32,97	33,55	34,52
3 Jasa Keuangan Lainnya	10,13	10,44	9,82	9,46	9,42
4 Jasa Penunjang Keuangan	4,37	4,58	4,33	4,31	4,47
Sektor Jasa Keuangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari sisi laju pertumbuhan, pola pertumbuhan yang dimiliki oleh lapangan usaha ini cukup fluktuatif. Tumbuh sebesar 3,55 persen pada tahun 2011, pada tahun 2012 pertumbuhannya naik tinggi menjadi 9,40 persen. Setelah tahun 2012 pertumbuhannya kembali melambat menjadi 7,76 persen pada tahun 2013 dan 4,54 persen pada tahun 2014. Laju pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha ini sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan yang dicapai oleh sub lapangan usaha jasa perantara keuangan. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan yang dicapai oleh sub lapangan usaha jasa perantara keuangan adalah 1,99 persen. Jauh lebih lambat dari yang dicapai pada tahun 2013 yang sebesar 7,66 persen dan tahun 2012 yang sebesar 11,34 persen. Namun masih lebih tinggi dari yang dicapai pada tahun 2011 yang sebesar 0,34 persen.

Gambar 4.10 Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2010-2014

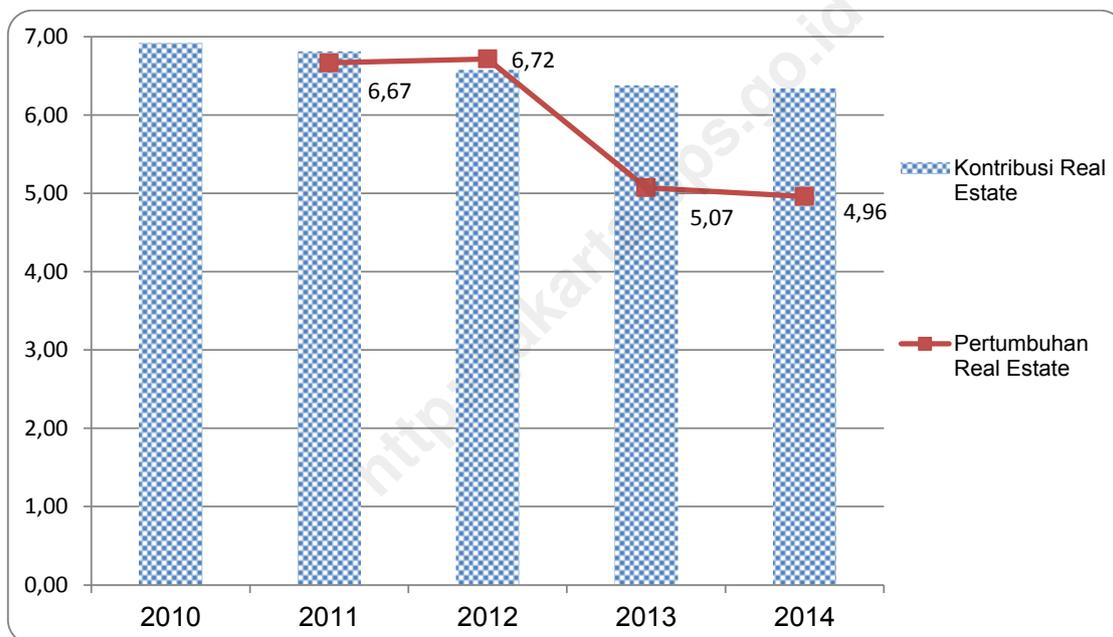


4.12 Real Estate (L)

Lapangan usaha real estate menjadi salah satu lapangan usaha yang memiliki kinerja sangat baik di Jakarta. Selama tahun 2010 hingga 2014 rata-rata nilai tambah yang diciptakan oleh lapangan usaha ini sekitar Rp 91,64 triliun, atau sekitar 6,6 persen terhadap PDRB DKI Jakarta. Namun demikian bila diikuti perkembangannya dari tahun ke tahun, kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini terhadap PDRB DKI Jakarta cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 kontribusinya mencapai 6,92 persen, namun pada tahun 2012 dan 2014 kontribusinya terus mengalami penurunan menjadi 6,58 persen dan 6,34 persen.

Penurunan kontribusi tersebut tidak terlepas dari perlambatan pertumbuhan yang dialami oleh lapangan usaha real estate. Agaknya pertumbuhan real estate yang sedemikian cepat sejak awal tahun 2000an mulai mendekati titik jenuh semenjak tahun 2013. Bila pada tahun 2012 lapangan usaha ini tumbuh 6,72 persen maka pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhannya melambat menjadi 5,07 persen dan 4,96 persen.

Gambar 4.11 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Real Este (Persen), 2010-2014

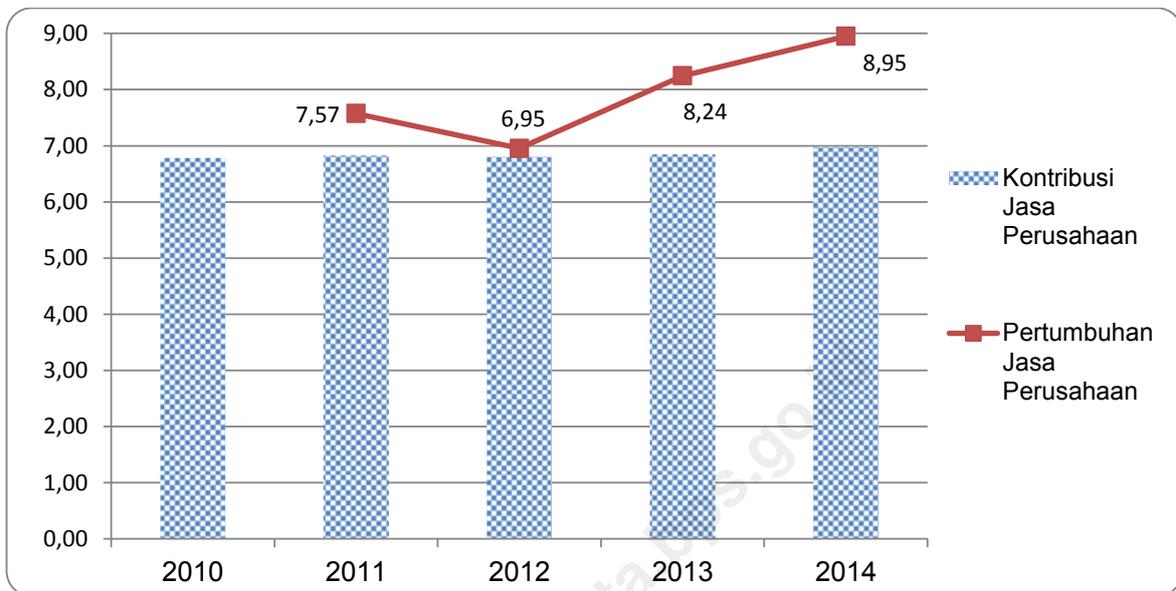


4.13 Jasa Perusahaan (M,N)

Lapangan usaha berikutnya yang juga memiliki kinerja luar biasa di Jakarta selama periode waktu tahun 2010 – 2014 adalah Jasa Perusahaan. Perkembangan kegiatan ekonomi turut mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi yang melayani usaha/perusahaan. Selama periode tersebut rata-rata nilai tambah yang dihasilkan jasa perusahaan per tahun adalah sebesar Rp 95,71 triliun, atau sekitar 6,85 persen dari total PDRB DKI Jakarta. Bila diperhatikan kontribusinya setiap tahun terlihat bahwa lapangan usaha ini terus menunjukkan peningkatan kontribusi. Bila pada tahun 2010 menyumbang 6,78 persen, maka pada tahun 2012 dan 2014 kontribusinya terus meningkat menjadi 6,81 persen dan 6,98 persen dari PDRB DKI Jakarta.

Demikian pula dengan laju pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan. Setiap tahunnya, pertumbuhan yang dicapai cenderung menunjukkan percepatan. Meskipun pada tahun 2012 sempat terjadi perlambatan pertumbuhan dari tahun 2011, yakni dari 7,57 persen menjadi 6,95 persen, pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhannya terakselerasi menjadi 8,24 persen dan 8,95 persen.

Gambar 4.12 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Perusahaan (Persen), 2010-2014

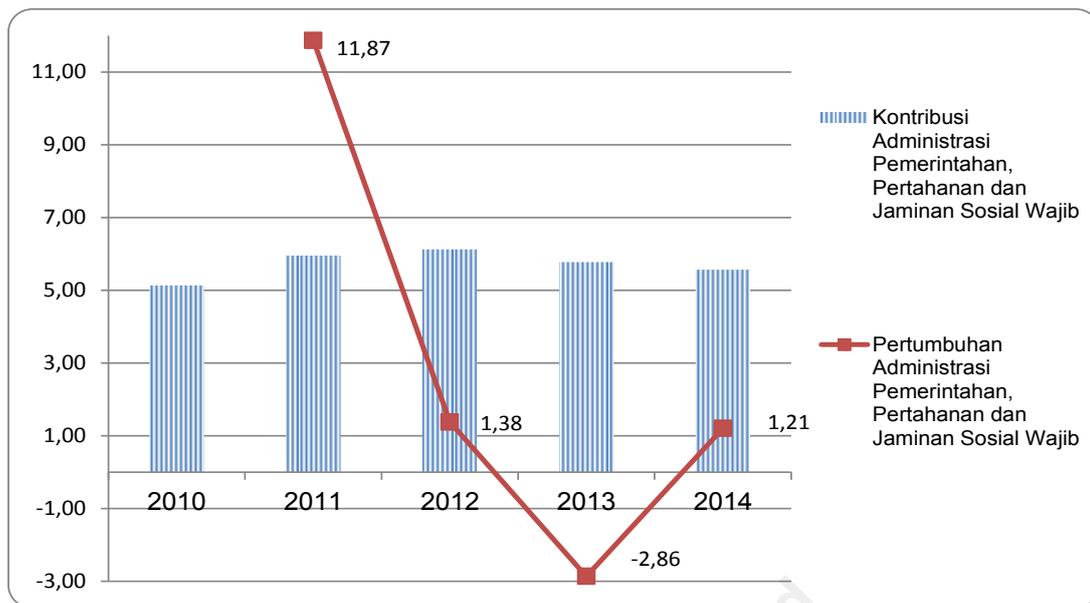


4.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O)

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan yang bentuknya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2014 rata-rata nilai tambah yang diciptakan oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar Rp 79,88 triliun, atau sekitar 5,71 persen dari PDRB DKI Jakarta. Kontribusi yang diberikan setiap tahunnya cukup berfluktuatif, dengan kontribusi terbesar diberikan pada tahun 2012 yang sebesar 6,12 persen. Sementara pada tahun 2014 kontribusinya adalah sebesar 5,57 persen.

Pola yang fluktuatif juga ditemui pada angka laju pertumbuhan yang dicapai lapangan usaha ini. Pada tahun 2014 pertumbuhan yang dicapai pada level 1,21 persen, lebih cepat dari yang dicapai tahun 2013 yang berkontraksi minus 2,86 persen. Namun demikian pada tahun 2011 pertumbuhannya terhitung tinggi, yakni sebesar 11,87 persen.

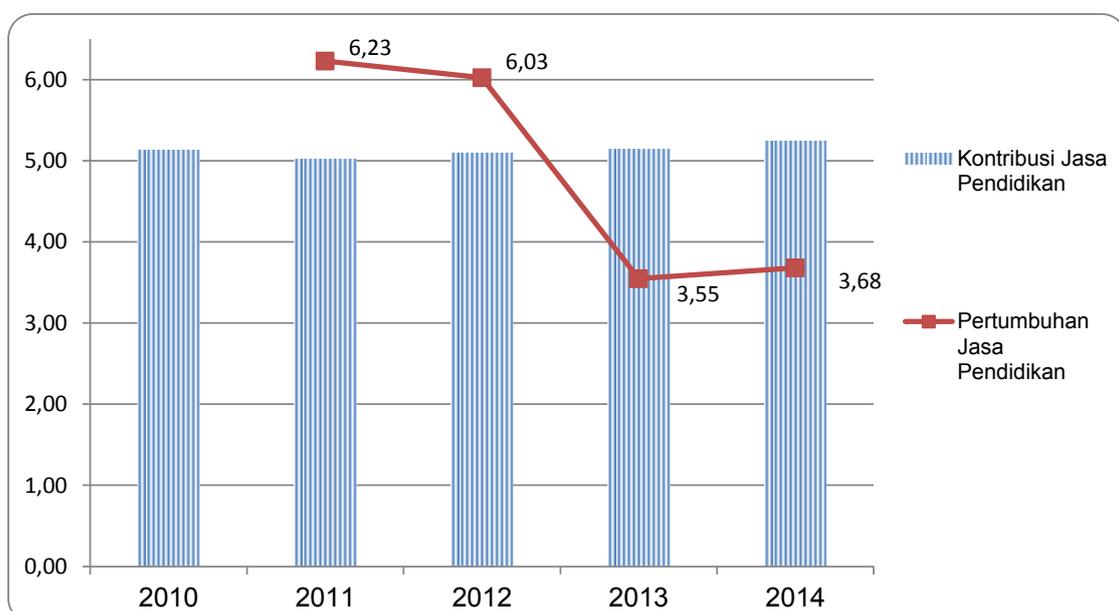
Gambar 4.13 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Persen), 2010-2014



4.15 Jasa Pendidikan (P)

Besarnya nilai tambah per tahun yang tercipta dari lapangan usaha Jasa Pendidikan setiap tahunnya adalah sebesar Rp 71,74 triliun selama periode tahun 2010 hingga 2014. Nilai tersebut setara dengan 5,13 persen dari total PDRB DKI Jakarta. Kontribusi terbesar diberikan oleh lapangan usaha ini pada tahun 2014, yakni sebesar 5,25 persen dari PDRB DKI Jakarta. Sementara itu, bila ditinjau dari sisi laju pertumbuhan, pertumbuhan tertinggi yang dicapai oleh lapangan usaha jasa pendidikan terjadi pada tahun 2011 dan 2012 dengan nilai 6,23 persen dan 6,03 persen. Sementara pada tahun 2013 dan 2014 lapangan usaha ini tumbuh 3,55 persen dan 3,68 persen. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2011 dan 2012 didorong oleh peningkatan kinerja kegiatan jasa pendidikan yang dilakukan oleh swasta.

Gambar 4.14 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Pendidikan (Persen), 2010-2014

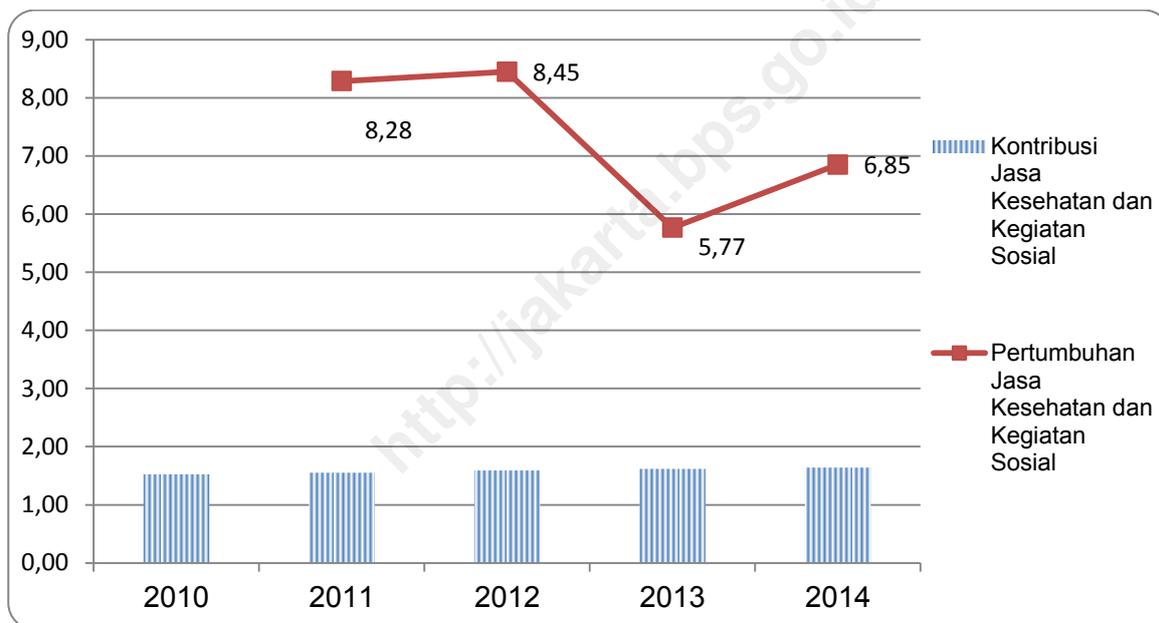


4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)

Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial meliputi kegiatan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selama tahun 2010 hingga 2014 nilai tambah yang diciptakan oleh lapangan usaha ini setiap tahunnya rata-rata sebesar Rp 22,22 triliun atau sekitar 1,59 persen dari PDRB DKI Jakarta. Trend kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Bila pada tahun 2010 kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini adalah 1,53 persen, kemudian pada tahun 2012 dan 2014 masing-masing sebesar 1,59 persen dan 1,64 persen.

Hal berbeda terjadi pada pola pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha ini. Pertumbuhan yang dicapai selama periode waktu 2010 hingga 2014 menunjukkan fluktuasi dengan trend perlambatan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan yang dicapai terbilang sangat baik karena masih berada di atas level 5 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2012 yang sebesar 8,45 persen, setelah itu pertumbuhan melambat menjadi 6,85 persen pada tahun 2014.

Gambar 4.15 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Persen), 2010-2014

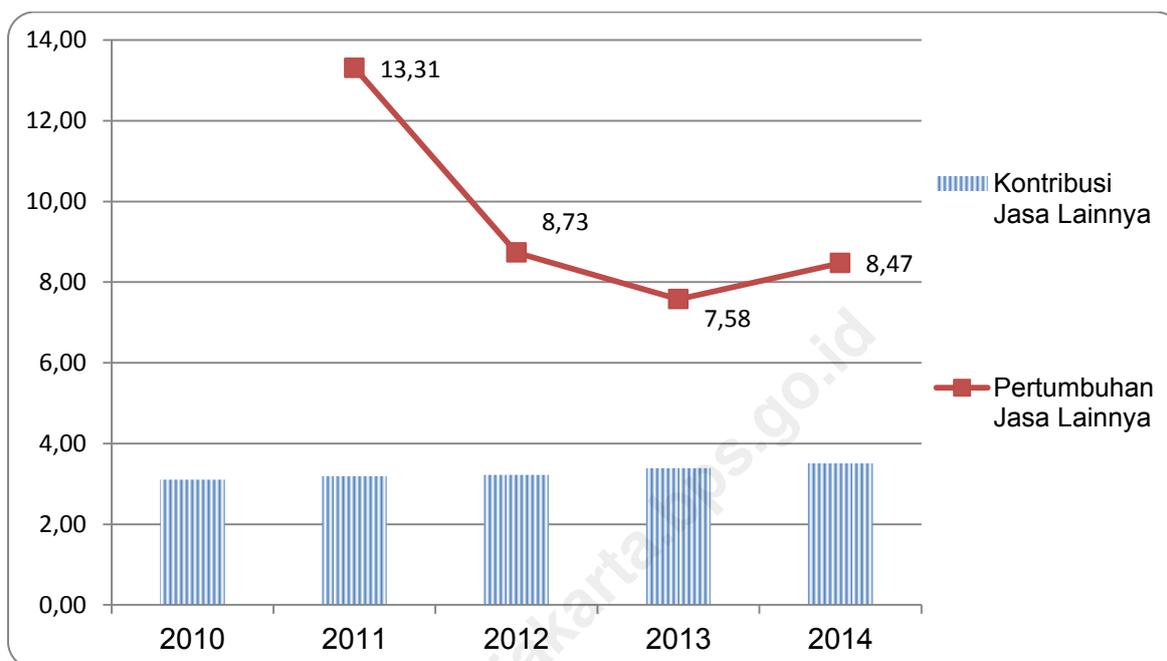


4.17 Jasa Lainnya (R,S,T,U)

Lapangan usaha jasa lainnya meliputi kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi, jasa perorangan yang melayani rumah tangga, dan kegiatan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Selama tahun 2010 sampai tahun 2014 rata-rata nilai tambah per tahun yang diciptakan oleh lapangan usaha ini adalah sebesar Rp 46,16 triliun atau sekitar 3,28 persen dari PDRB DKI Jakarta. Kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini menunjukkan trend peningkatan di setiap tahunnya, yakni dari sebesar 3,10 persen di tahun 2010 meningkat menjadi 3,23 persen pada tahun 2012 dan 3,51 persen pada tahun 2014.

Peningkatan kegiatan sektor jasa di Jakarta tercermin jelas salah satunya melalui pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha ini. Meskipun pertumbuhan menunjukkan fluktuasi di setiap tahunnya, namun level pertumbuhannya selalu berada di atas 7,5 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2011, yakni sebesar 13,31 persen, sementara pada tahun 2014 pertumbuhannya tercatat sebesar 8,47 persen.

Gambar 4.16 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Lainnya (Persen), 2010-2014



Lampiran

<http://jakarta.ms.go.id>

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2010–2014**

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 275 625,4	1 391 244,1	1 488 287,9	1 617 665,8	1 710 591,3
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	766 963,1	837 665,0	887 737,8	961 917,5	1 010 765,5
a. Tanaman Pangan	21 705,2	22 065,6	24 488,7	26 366,7	27 202,6
b. Tanaman Hortikultura Semusim	28 767,7	31 547,0	33 147,1	35 274,2	36 766,6
c. Perkebunan Semusim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	641 666,0	700 080,7	745 574,5	805 739,1	846 021,6
e. Perkebunan Tahunan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f. Peternakan	65 276,2	73 416,2	72 972,8	80 945,7	86 362,1
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	9 548,0	10 555,5	11 554,7	13 591,8	14 412,6
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Perikanan	508 662,3	553 579,1	600 550,1	655 748,3	699 825,8
B Pertambangan dan Penggalian	2 903 927,9	3 731 155,9	4 011 417,1	4 287 997,8	4 540 965,0
1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	2 438 238,2	3 227 956,0	3 489 702,2	3 742 417,8	3 954 104,2
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Pertambangan Biji Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	465 689,8	503 200,0	521 714,9	545 580,1	586 860,8
C Industri Pengolahan	152 651 051,6	170 047 903,8	188 822 070,3	209 779 300,1	239 596 847,9
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	49 175,0	56 190,8	63 729,8	71 761,1	84 483,8
2 Industri Makanan dan Minuman	8 935 457,3	9 724 684,6	11 144 177,2	12 647 554,1	14 375 000,3
3 Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	9 807 798,2	10 517 146,1	11 255 641,8	12 186 139,8	13 195 827,8
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	221 325,6	236 005,7	243 461,4	272 635,1	296 778,4
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	286 786,6	330 406,1	364 025,9	405 938,7	452 204,3
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4 842 664,0	5 463 989,4	5 947 660,0	6 609 080,8	7 468 829,5
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	22 134 507,9	23 885 765,1	26 177 131,1	28 852 795,9	30 724 709,0
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3 729 170,3	3 947 176,7	4 033 802,6	4 705 905,2	5 030 927,0
10 Industri Barang Galian bukan Logam	1 635 653,0	1 774 724,3	1 948 066,3	2 240 487,6	2 371 565,9
11 Industri Logam Dasar	5 154 143,6	5 428 863,8	6 053 951,7	6 601 955,0	7 177 650,0
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	11 105 138,4	11 658 725,7	12 973 835,8	14 973 583,2	16 312 539,1
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	233 135,2	275 693,5	284 234,1	308 828,9	344 869,2
14 Industri Alat Angkutan	81 366 383,3	93 116 414,1	104 134 378,7	115 143 546,0	136 323 241,7
15 Industri Furnitur	1 526 682,4	1 775 143,2	1 998 006,9	2 270 985,1	2 530 304,4
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1 623 030,9	1 856 974,7	2 199 966,9	2 488 103,6	2 907 917,2
D Pengadaan Listrik, Gas	3 288 524,3	4 365 301,5	5 150 904,8	5 094 206,4	5 580 451,3
1 Ketenagalistrikan	1 181 898,1	1 328 955,4	1 436 964,8	1 383 903,1	1 572 853,3
2 Gas	2 106 626,3	3 036 346,1	3 714 940,0	3 710 303,4	4 007 598,0
E Pengadaan Air	549 017,9	579 525,3	611 521,5	654 898,7	705 338,9
F Konstruksi	150 719 658,8	169 904 405,7	188 935 057,0	210 651 141,2	234 183 637,2
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	180 815 085,9	207 488 862,7	224 375 960,1	261 099 628,9	304 655 211,3
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	29 610 326,6	33 893 527,2	37 958 490,5	45 405 876,9	52 298 746,2
2 Perdagangan Besar dan Eceran	151 204 759,3	173 595 335,5	186 417 469,6	215 693 752,1	252 356 465,1
H Transportasi dan Pergudangan	29 857 309,9	33 836 286,1	37 475 327,0	44 161 745,1	54 847 839,7
1 Angkutan Rel	465 676,3	458 180,8	495 347,4	561 962,5	608 667,9
2 Angkutan Darat	14 021 139,8	15 878 967,0	17 277 434,6	21 434 441,6	25 494 938,8
3 Angkutan Laut	4 233 178,7	4 690 882,0	5 199 090,9	5 612 839,0	6 119 649,6
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	22 080,9	22 876,4	23 445,5	24 624,0	26 032,8
5 Angkutan Udara	176 979,5	185 935,1	191 189,4	195 485,9	3 324 703,8
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	10 938 254,6	12 599 444,9	14 288 819,2	16 332 392,1	19 273 846,8
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53 859 895,7	61 561 677,2	69 531 496,0	79 770 098,1	92 373 841,9
1 Penyediaan Akomodasi	7 469 205,7	8 712 948,1	10 446 581,6	13 237 996,6	15 505 111,0
2 Penyediaan Makan Minum	46 390 690,0	52 848 729,1	59 084 914,4	66 532 101,5	76 868 731,0
J Informasi dan Komunikasi	80 971 283,2	91 084 185,1	102 750 295,1	115 909 491,4	128 385 277,8
K Jasa Keuangan dan Asuransi	110 704 217,9	120 814 765,3	143 347 879,7	163 028 256,8	178 998 124,5
1 Jasa Perantara Keuangan	58 135 454,4	61 608 453,9	75 795 348,3	85 878 843,2	92 339 151,6
2 Asuransi dan Dana Pensiun	36 511 597,3	41 067 612,2	47 264 880,5	54 703 261,9	61 795 215,8
3 Jasa Keuangan Lainnya	11 231 257,5	12 624 821,0	14 096 008,9	15 443 667,0	16 882 011,4
4 Jasa Penunjang Keuangan	4 825 908,7	5 513 878,2	6 191 642,0	7 002 484,7	7 981 745,7
L Real Estat	74 400 099,6	83 387 678,7	90 061 955,3	98 684 130,1	111 671 973,3
M,N Jasa Perusahaan	72 937 188,9	83 570 794,1	93 199 640,3	105 903 828,3	122 924 323,8
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	55 242 936,2	72 888 833,0	83 862 784,3	89 312 048,9	98 084 955,1
P Jasa Pendidikan	55 243 382,9	61 505 856,3	69 871 172,1	79 619 389,0	92 477 341,8
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16 408 293,6	18 987 046,1	21 759 582,4	25 065 341,9	28 886 966,8
R,S,T,U Jasa lainnya	33 355 980,8	39 072 963,6	44 177 288,1	52 398 608,3	61 783 376,0
Produk Domestik Regional Bruto	1 075 183 480,5	1 224 218 484,5	1 369 432 639,1	1 547 037 776,8	1 761 407 063,7

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2010–2014**

Lapangan Usaha/Industry	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 275 625,4	1 277 277,9	1 319 309,5	1 344 813,3	1 354 586,3
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	766 963,1	779 144,3	792 093,5	806 747,4	806 458,5
a. Tanaman Pangan	21 705,2	20 063,8	21 541,5	21 925,6	21 978,2
b. Tanaman Hortikultura Semusim	28 767,7	29 387,0	29 607,4	29 927,2	30 154,7
c. Perkebunan Semusim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	641 666,0	649 064,2	662 871,9	674 604,7	673 053,1
e. Perkebunan Tahunan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f. Peternakan	65 276,2	71 007,5	68 372,2	70 430,2	71 296,5
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	9 548,0	9 621,7	9 700,6	9 859,7	9 976,0
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Perikanan	508 662,3	498 133,6	527 216,0	538 066,0	548 127,8
B Pertambangan dan Penggalian	2 903 927,9	3 029 331,0	3 009 260,1	3 002 786,8	2 976 969,3
1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	2 438 238,2	2 543 570,1	2 509 994,9	2 485 648,0	2 453 831,7
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	465 689,8	485 761,0	499 265,2	517 138,8	523 137,7
C Industri Pengolahan	152 651 051,6	156 240 345,2	160 011 696,0	168 790 752,5	178 116 721,0
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	49 175,0	49 907,7	51 808,6	54 422,6	54 662,1
2 Industri Makanan dan Minuman	8 935 457,3	9 241 049,9	10 019 146,3	10 684 869,5	11 216 762,3
3 Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	9 807 798,2	9 657 797,8	9 577 077,0	9 603 538,4	9 756 234,6
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	221 325,6	219 200,9	214 675,8	222 311,6	229 957,1
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	286 786,6	300 495,0	308 939,0	322 594,1	329 497,6
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4 842 664,0	4 929 347,6	5 106 625,4	5 231 893,4	5 358 505,3
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	22 134 507,9	21 917 567,6	21 842 433,4	23 486 285,8	24 345 911,5
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3 729 170,3	3 657 197,3	3 573 325,5	3 591 590,4	3 554 776,0
10 Industri Barang Galian bukan Logam	1 635 653,0	1 620 441,4	1 634 533,7	1 694 625,8	1 751 226,3
11 Industri Logam Dasar	5 154 143,6	4 991 783,3	5 065 744,3	5 036 458,8	5 186 364,0
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	11 105 138,4	10 775 262,0	11 187 926,8	12 078 382,4	13 051 900,0
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	233 135,2	243 696,2	228 759,3	228 736,3	219 724,1
14 Industri Alat Angkutan	81 366 383,3	85 402 155,9	87 838 379,1	93 078 655,0	99 612 776,6
15 Industri Furnitur	1 526 682,4	1 577 490,1	1 629 004,8	1 679 458,8	1 580 874,5
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1 623 030,9	1 656 952,2	1 733 317,0	1 796 929,7	1 867 549,1
D Pengadaan Listrik, Gas	3 288 524,3	3 457 900,8	3 642 496,5	3 678 886,6	3 743 486,9
1 Ketenagalistrikan	1 181 898,1	1 250 071,7	1 352 225,1	1 394 023,4	1 430 519,9
2 Gas	2 106 626,3	2 207 829,2	2 290 271,4	2 284 863,2	2 312 967,0
E Pengadaan Air	549 017,9	565 083,6	588 514,8	610 155,0	633 035,8
F Konstruksi	150 719 658,8	160 265 131,2	168 958 209,6	179 200 526,5	187 587 111,1
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	180 815 085,9	193 770 455,7	206 961 971,4	218 028 632,2	228 818 209,5
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	29 610 326,6	32 045 716,1	34 669 198,1	37 726 630,8	39 835 500,6
2 Perdagangan Besar dan Eceran	151 204 759,3	161 724 739,6	172 292 773,3	180 302 001,4	188 982 708,9
H Transportasi dan Pergudangan	29 857 309,9	32 081 729,0	34 306 412,6	36 734 135,1	41 774 388,5
1 Angkutan Rel	465 676,3	449 452,3	450 312,9	460 235,8	469 118,4
2 Angkutan Darat	14 021 139,8	15 095 998,1	16 261 302,3	17 528 947,9	19 008 028,9
3 Angkutan Laut	4 233 178,7	4 472 265,1	4 701 456,8	4 662 317,1	4 614 108,8
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	22 080,9	22 308,4	22 203,9	22 113,2	22 148,6
5 Angkutan Udara	176 979,5	178 560,5	176 815,9	171 339,8	2 448 163,5
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	10 938 254,6	11 863 144,6	12 694 320,8	13 889 181,3	15 212 820,3
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53 859 895,7	57 627 414,8	61 258 499,4	65 212 521,5	68 995 365,1
1 Penyediaan Akomodasi	7 469 205,7	8 091 439,9	8 744 187,3	9 609 400,6	10 467 520,1
2 Penyediaan Makan Minum	46 390 690,0	49 535 974,9	52 514 312,1	55 603 120,8	58 527 845,0
J Informasi dan Komunikasi	80 971 283,2	90 736 419,9	103 212 677,7	115 748 679,5	128 573 633,2
K Jasa Keuangan dan Asuransi	110 704 217,9	114 639 141,0	125 417 028,4	135 147 547,6	141 289 441,3
1 Jasa Perantara Keuangan	58 135 454,4	58 330 990,8	64 945 070,4	69 919 053,3	71 310 600,3
2 Asuransi dan Dana Pensiun	36 511 597,3	39 101 728,5	42 282 869,9	45 999 474,8	49 484 471,2
3 Jasa Keuangan Lainnya	11 231 257,5	12 018 094,0	12 545 686,6	13 100 545,4	13 929 397,2
4 Jasa Penunjang Keuangan	4 825 908,7	5 188 327,8	5 643 401,6	6 128 474,2	6 564 972,6
L Real Estat	74 400 099,6	79 359 564,6	84 689 741,9	88 985 510,5	93 399 191,9
M,N Jasa Perusahaan	72 937 188,9	78 460 803,0	83 916 951,0	90 835 653,0	98 965 443,9
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	55 242 936,2	61 800 272,7	62 651 011,9	60 859 266,1	61 594 053,5
P Jasa Pendidikan	55 243 035,9	58 684 434,3	62 220 200,0	64 427 115,4	66 798 033,3
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16 408 293,6	17 767 542,8	19 268 300,9	20 379 279,1	21 775 259,7
R,S,T,U Jasa lainnya	33 355 980,8	37 795 378,8	41 095 643,2	44 209 165,0	47 953 681,3
Produk Domestik Regional Bruto	1 075 183 133,5	1 147 558 226,4	1 222 527 924,9	1 297 195 425,9	1 374 348 611,7

Angka sementara

* Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2010–2014

Lapangan Usaha/Industry		2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
	a. Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
	e. Perkebunan Tahunan	-	-	-	-	-
	f. Peternakan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
	3 Perikanan	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,30	0,29	0,28	0,26
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,23	0,26	0,25	0,24	0,22
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
C	Industri Pengolahan	14,20	13,89	13,79	13,56	13,60
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,83	0,79	0,81	0,82	0,82
	3 Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,91	0,86	0,82	0,79	0,75
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,45	0,45	0,43	0,43	0,42
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2,06	1,95	1,91	1,87	1,74
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,35	0,32	0,29	0,30	0,29
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13
	11 Industri Logam Dasar	0,48	0,44	0,44	0,43	0,41
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	1,03	0,95	0,95	0,97	0,93
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	14 Industri Alat Angkutan	7,57	7,61	7,60	7,44	7,74
	15 Industri Furnitur	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,31	0,36	0,38	0,33	0,32
	1 Ketenagalistrikan	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09
	2 Gas	0,20	0,25	0,27	0,24	0,23
E	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	14,02	13,88	13,80	13,62	13,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,82	16,95	16,38	16,88	17,30
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2,75	2,77	2,77	2,94	2,97
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	14,06	14,18	13,61	13,94	14,33
H	Transportasi dan Pergudangan	2,78	2,76	2,74	2,85	3,11
	1 Angkutan Rel	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
	2 Angkutan Darat	1,30	1,30	1,26	1,39	1,45
	3 Angkutan Laut	0,39	0,38	0,38	0,36	0,35
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,02	0,02	0,01	0,01	0,19
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1,02	1,03	1,04	1,06	1,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,01	5,03	5,08	5,16	5,24
	1 Penyediaan Akomodasi	0,69	0,71	0,76	0,86	0,88
	2 Penyediaan Makan Minum	4,31	4,32	4,31	4,30	4,36
J	Informasi dan Komunikasi	7,53	7,44	7,50	7,49	7,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,30	9,87	10,47	10,54	10,16
	1 Jasa Perantara Keuangan	5,41	5,03	5,53	5,55	5,24
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	3,40	3,35	3,45	3,54	3,51
	3 Jasa Keuangan Lainnya	1,04	1,03	1,03	1,00	0,96
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
L	Real Estat	6,92	6,81	6,58	6,38	6,34
M,N	Jasa Perusahaan	6,78	6,83	6,81	6,85	6,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,14	5,95	6,12	5,77	5,57
P	Jasa Pendidikan	5,14	5,02	5,10	5,15	5,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,55	1,59	1,62	1,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,10	3,19	3,23	3,39	3,51
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 4. Distibusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010–2014

Lapangan Usaha/Industry	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
a. Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-	-
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
e. Perkebunan Tahunan	-	-	-	-	-
f. Peternakan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
3 Perikanan	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
B Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22
1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,23	0,22	0,21	0,19	0,18
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
C Industri Pengolahan	14,20	13,62	13,09	13,01	12,96
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Industri Makanan dan Minuman	0,83	0,81	0,82	0,82	0,82
3 Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,91	0,84	0,78	0,74	0,71
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2,06	1,91	1,79	1,81	1,77
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,35	0,32	0,29	0,28	0,26
10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13
11 Industri Logam Dasar	0,48	0,43	0,41	0,39	0,38
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	1,03	0,94	0,92	0,93	0,95
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14 Industri Alat Angkutan	7,57	7,44	7,18	7,18	7,25
15 Industri Furnitur	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
D Pengadaan Listrik, Gas	0,31	0,30	0,30	0,28	0,27
1 Ketenagalistrikan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
2 Gas	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17
E Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F Konstruksi	14,02	13,97	13,82	13,81	13,65
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,82	16,89	16,93	16,81	16,65
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2,75	2,79	2,84	2,91	2,90
2 Perdagangan Besar dan Eceran	14,06	14,09	14,09	13,90	13,75
H Transportasi dan Pergudangan	2,78	2,80	2,81	2,83	3,04
1 Angkutan Rel	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
2 Angkutan Darat	1,30	1,32	1,33	1,35	1,38
3 Angkutan Laut	0,39	0,39	0,38	0,36	0,34
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Angkutan Udara	0,02	0,02	0,01	0,01	0,18
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1,02	1,03	1,04	1,07	1,11
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,01	5,02	5,01	5,03	5,02
1 Penyediaan Akomodasi	0,69	0,71	0,72	0,74	0,76
2 Penyediaan Makan Minum	4,31	4,32	4,30	4,29	4,26
J Informasi dan Komunikasi	7,53	7,91	8,44	8,92	9,36
K Jasa Keuangan dan Asuransi	10,30	9,99	10,26	10,42	10,28
1 Jasa Perantara Keuangan	5,41	5,08	5,31	5,39	5,19
2 Asuransi dan Dana Pensiun	3,40	3,41	3,46	3,55	3,60
3 Jasa Keuangan Lainnya	1,04	1,05	1,03	1,01	1,01
4 Jasa Penunjang Keuangan	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48
L Real Estat	6,92	6,92	6,93	6,86	6,80
M,N Jasa Perusahaan	6,78	6,84	6,86	7,00	7,20
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,14	5,39	5,12	4,69	4,48
P Jasa Pendidikan	5,14	5,11	5,09	4,97	4,86
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,55	1,58	1,57	1,58
R,S,T,U Jasa lainnya	3,10	3,29	3,36	3,41	3,49
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2010–2014

Lapangan Usaha/Industry		2011	2012	2013*	2014**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,06	6,98	8,69	5,74
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,22	5,98	8,36	5,08
	a. Tanaman Pangan	1,66	10,98	7,67	3,17
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	9,66	5,07	6,42	4,23
	c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	9,10	6,50	8,07	5,00
	e. Perkebunan Tahunan	-	-	-	-
	f. Peternakan	12,47	(0,60)	10,93	6,69
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	10,55	9,47	17,63	6,04
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-
	3 Perikanan	8,83	8,48	9,19	6,72
B	Pertambangan dan Penggalian	28,49	7,51	6,89	5,90
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	32,39	8,11	7,24	5,66
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	8,05	3,68	4,57	7,57
C	Industri Pengolahan	11,40	11,04	11,10	14,21
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	14,27	13,42	12,60	17,73
	2 Industri Makanan dan Minuman	8,83	14,60	13,49	13,66
	3 Pengolahan Tembakau	-	-	-	-
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	7,23	7,02	8,27	8,29
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6,63	3,16	11,98	8,86
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	15,21	10,18	11,51	11,40
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	12,83	8,85	11,12	13,01
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,91	9,59	10,22	6,49
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,85	2,19	16,66	6,91
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	8,50	9,77	15,01	5,85
	11 Industri Logam Dasar	5,33	11,51	9,05	8,72
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	4,98	11,28	15,41	8,94
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	18,25	3,10	8,65	11,67
	14 Industri Alat Angkutan	14,44	11,83	10,57	18,39
	15 Industri Furnitur	16,27	12,55	13,66	11,42
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	14,41	18,47	13,10	16,87
D	Pengadaan Listrik, Gas	32,74	18,00	(1,10)	9,55
	1 Ketenagalistrikan	12,44	8,13	(3,69)	13,65
	2 Gas	44,13	22,32	(0,10)	8,01
E	Pengadaan Air	5,56	5,52	7,09	7,70
F	Konstruksi	12,73	11,20	11,49	11,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,75	8,14	16,37	16,68
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	14,47	11,99	19,62	15,18
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	14,81	7,39	15,70	17,00
H	Transportasi dan Pergudangan	13,33	10,75	17,84	24,20
	1 Angkutan Rel	(1,61)	8,11	13,45	8,31
	2 Angkutan Darat	13,25	8,81	24,06	18,94
	3 Angkutan Laut	10,81	10,83	7,96	9,03
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3,60	2,49	5,03	5,72
	5 Angkutan Udara	5,06	2,83	2,25	1 600,74
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	15,19	13,41	14,30	18,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,30	12,95	14,73	15,80
	1 Penyediaan Akomodasi	16,65	19,90	26,72	17,13
	2 Penyediaan Makan Minum	13,92	11,80	12,60	15,54
J	Informasi dan Komunikasi	12,49	12,81	12,81	10,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,13	18,65	13,73	9,80
	1 Jasa Perantara Keuangan	5,97	23,03	13,30	7,52
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	12,48	15,09	15,74	12,96
	3 Jasa Keuangan Lainnya	12,41	11,65	9,56	9,31
	4 Jasa Penunjang Keuangan	14,26	12,29	13,10	13,98
L	Real Estat	12,08	8,00	9,57	13,16
M,N	Jasa Perusahaan	14,58	11,52	13,63	16,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	31,94	15,06	6,50	9,82
P	Jasa Pendidikan	11,34	13,60	13,95	16,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,72	14,60	15,19	15,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	17,14	13,06	18,61	17,91
Produk Domestik Regional Bruto		13,86	11,86	12,97	13,86

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2010–2014

Lapangan Usaha/Industry		2011	2012	2013*	2014**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,13	3,29	1,93	0,73
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,59	1,66	1,85	(0,04)
	a. Tanaman Pangan	(7,56)	7,36	1,78	0,24
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	2,15	0,75	1,08	0,76
	c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,15	2,13	1,77	(0,23)
	e. Perkebunan Tahunan	-	-	-	-
	f. Peternakan	8,78	(3,71)	3,01	1,23
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,77	0,82	1,64	1,18
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-
	3 Perikanan	(2,07)	5,84	2,06	1,87
B	Pertambangan dan Penggalian	4,32	(0,66)	(0,22)	(0,86)
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	4,32	(1,32)	(0,97)	(1,28)
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-
	3 Pertambangan Biji Logam	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4,31	2,78	3,58	1,16
C	Industri Pengolahan	2,35	2,41	5,49	5,53
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	1,49	3,81	5,05	0,44
	2 Industri Makanan dan Minuman	3,42	8,42	6,64	4,98
	3 Pengolahan Tembakau	-	-	-	-
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	(1,53)	(0,84)	0,28	1,59
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	(0,96)	(2,06)	3,56	3,44
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	4,78	2,81	4,42	2,14
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1,79	3,60	2,45	2,42
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	(0,98)	(0,34)	7,53	3,66
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	(1,93)	(2,29)	0,51	(1,03)
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	(0,93)	0,87	3,68	3,34
	11 Industri Logam Dasar	(3,15)	1,48	(0,58)	2,98
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	(2,97)	3,83	7,96	8,06
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	4,53	(6,13)	(0,01)	(3,94)
	14 Industri Alat Angkutan	4,96	2,85	5,97	7,02
	15 Industri Furnitur	3,33	3,27	3,10	(5,87)
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	2,09	4,61	3,67	3,93
D	Pengadaan Listrik, Gas	5,15	5,34	1,00	1,76
	1 Ketenagalistrikan	5,77	8,17	3,09	2,62
	2 Gas	4,80	3,73	(0,24)	1,23
E	Pengadaan Air	2,93	4,15	3,68	3,75
F	Konstruksi	6,33	5,42	6,06	4,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,16	6,81	5,35	4,95
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	8,22	8,19	8,82	5,59
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	6,96	6,53	4,65	4,81
H	Transportasi dan Pergudangan	7,45	6,93	7,08	13,72
	1 Angkutan Rel	(3,48)	0,19	2,20	1,93
	2 Angkutan Darat	7,67	7,72	7,80	8,44
	3 Angkutan Laut	5,65	5,12	(0,83)	(1,03)
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1,03	(0,47)	(0,41)	0,16
	5 Angkutan Udara	0,89	(0,98)	(3,10)	1 328,84
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	8,46	7,01	9,41	9,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,00	6,30	6,45	5,80
	1 Penyediaan Akomodasi	8,33	8,07	9,89	8,93
	2 Penyediaan Makan Minum	6,78	6,01	5,88	5,26
J	Informasi dan Komunikasi	12,06	13,75	12,15	11,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	9,40	7,76	4,54
	1 Jasa Perantara Keuangan	0,34	11,34	7,66	1,99
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	7,09	8,14	8,79	7,58
	3 Jasa Keuangan Lainnya	7,01	4,39	4,42	6,33
	4 Jasa Penunjang Keuangan	7,51	8,77	8,60	7,12
L	Real Estat	6,67	6,72	5,07	4,96
M,N	Jasa Perusahaan	7,57	6,95	8,24	8,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,87	1,38	(2,86)	1,21
P	Jasa Pendidikan	6,23	6,03	3,55	3,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,28	8,45	5,77	6,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	13,31	8,73	7,58	8,47
Produk Domestik Regional Bruto		6,73	6,53	6,11	5,95

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2010–2014

Lapangan Usaha/Industry		2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	109,06	116,67	126,81	134,10
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	100,00	109,22	115,75	125,42	131,79
	a. Tanaman Pangan	100,00	101,66	112,82	121,48	125,33
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	100,00	109,66	115,22	122,62	127,81
	c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	100,00	109,10	116,19	125,57	131,85
	e. Perkebunan Tahunan	-	-	-	-	-
	f. Peternakan	100,00	112,47	111,79	124,00	132,30
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	100,00	110,55	121,02	142,35	150,95
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
	3 Perikanan	100,00	108,83	118,06	128,92	137,58
B	Pertambangan dan Penggalian	100,00	128,49	138,14	147,66	156,37
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	100,00	132,39	143,12	153,49	162,17
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	100,00	108,05	112,03	117,16	126,02
C	Industri Pengolahan	100,00	111,40	123,70	137,42	156,96
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	100,00	114,27	129,60	145,93	171,80
	2 Industri Makanan dan Minuman	100,00	108,83	124,72	141,54	160,88
	3 Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	100,00	107,23	114,76	124,25	134,54
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	100,00	106,63	110,00	123,18	134,09
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	100,00	115,21	126,93	141,55	157,68
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	100,00	112,83	122,82	136,48	154,23
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	100,00	107,91	118,26	130,35	138,81
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	100,00	105,85	108,17	126,19	134,91
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	100,00	108,50	119,10	136,98	144,99
	11 Industri Logam Dasar	100,00	105,33	117,46	128,09	139,26
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	100,00	104,98	116,83	134,83	146,89
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	100,00	118,25	121,92	132,47	147,93
	14 Industri Alat Angkutan	100,00	114,44	127,98	141,51	167,54
	15 Industri Furnitur	100,00	116,27	130,87	148,75	165,74
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	100,00	114,41	135,55	153,30	179,17
D	Pengadaan Listrik, Gas	100,00	132,74	156,63	154,91	169,69
	1 Ketenagalistrikan	100,00	112,44	121,58	117,09	133,08
	2 Gas	100,00	144,13	176,30	176,13	190,24
E	Pengadaan Air	100,00	105,56	111,38	119,29	128,47
F	Konstruksi	100,00	112,73	125,36	139,76	155,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	114,75	124,09	144,40	168,49
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	100,00	114,47	128,19	153,34	176,62
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	100,00	114,81	123,29	142,65	166,90
H	Transportasi dan Pergudangan	100,00	113,33	125,51	147,91	183,70
	1 Angkutan Rel	100,00	98,39	106,37	120,68	130,71
	2 Angkutan Darat	100,00	113,25	123,22	152,87	181,83
	3 Angkutan Laut	100,00	110,81	122,82	132,59	144,56
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	100,00	103,60	106,18	111,52	117,90
	5 Angkutan Udara	100,00	105,06	108,03	110,46	1878,58
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	100,00	115,19	130,63	149,31	176,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	114,30	129,10	148,11	171,51
	1 Penyediaan Akomodasi	100,00	116,65	139,86	177,23	207,59
	2 Penyediaan Makan Minum	100,00	113,92	127,36	143,42	165,70
J	Informasi dan Komunikasi	100,00	112,49	126,90	143,15	158,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	109,13	129,49	147,26	161,69
	1 Jasa Perantara Keuangan	100,00	105,97	130,38	147,72	158,83
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	100,00	112,48	129,45	149,82	169,25
	3 Jasa Keuangan Lainnya	100,00	112,41	125,51	137,51	150,31
	4 Jasa Penunjang Keuangan	100,00	114,26	128,30	145,10	165,39
L	Real Estat	100,00	112,08	121,05	132,64	150,10
M,N	Jasa Perusahaan	100,00	114,58	127,78	145,20	168,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	131,94	151,81	161,67	177,55
P	Jasa Pendidikan	100,00	111,34	126,48	144,12	167,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	115,72	132,61	152,76	176,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	100,00	117,14	132,44	157,09	185,22
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	113,86	127,37	143,89	163,82

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010–2014

Lapangan Usaha/Industry		2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	100,13	103,42	105,42	106,19
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	100,00	101,59	103,28	105,19	105,15
	a. Tanaman Pangan	100,00	92,44	99,25	101,02	101,26
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	100,00	102,15	102,92	104,03	104,82
	c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	100,00	101,15	103,30	105,13	104,89
	e. Perkebunan Tahunan	-	-	-	-	-
	f. Peternakan	100,00	108,78	104,74	107,90	109,22
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	100,00	100,77	101,60	103,26	104,48
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
	3 Perikanan	100,00	97,93	103,65	105,78	107,76
B	Pertambangan dan Penggalian	100,00	104,32	103,63	103,40	102,52
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	100,00	104,32	102,94	101,94	100,64
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Biji Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	100,00	104,31	107,21	111,05	112,34
C	Industri Pengolahan	100,00	102,35	104,82	110,57	116,68
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	100,00	101,49	105,36	110,67	111,16
	2 Industri Makanan dan Minuman	100,00	103,42	112,13	119,58	125,53
	3 Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	100,00	98,47	97,65	97,92	99,47
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	100,00	99,04	97,00	100,45	103,90
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	100,00	104,78	107,72	112,49	114,89
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	100,00	101,79	105,45	108,04	110,65
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	100,00	99,02	98,68	106,11	109,99
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	100,00	98,07	95,82	96,31	95,32
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	100,00	99,07	99,93	103,61	107,07
	11 Industri Logam Dasar	100,00	96,85	98,28	97,72	100,63
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	100,00	97,03	100,75	108,76	117,53
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	100,00	104,53	98,12	98,11	94,25
	14 Industri Alat Angkutan	100,00	104,96	107,95	114,39	122,42
	15 Industri Furnitur	100,00	103,33	106,70	110,01	103,55
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	100,00	102,09	106,80	110,71	115,07
D	Pengadaan Listrik, Gas	100,00	105,15	110,76	111,87	113,83
	1 Ketenagalistrikan	100,00	105,77	114,41	117,95	121,04
	2 Gas	100,00	104,80	108,72	108,46	109,79
E	Pengadaan Air	100,00	102,93	107,19	111,14	115,30
F	Konstruksi	100,00	106,33	112,10	118,90	124,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	107,16	114,46	120,58	126,55
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Perasasinya	100,00	108,22	117,08	127,41	134,53
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	100,00	106,96	113,95	119,24	124,98
H	Transportasi dan Pergudangan	100,00	107,45	114,90	123,03	139,91
	1 Angkutan Rel	100,00	96,52	96,70	98,83	100,74
	2 Angkutan Darat	100,00	107,67	115,98	125,02	135,57
	3 Angkutan Laut	100,00	105,65	111,06	110,14	109,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	100,00	101,03	100,56	100,15	100,31
	5 Angkutan Udara	100,00	100,89	99,91	96,81	1383,30
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	100,00	108,46	116,05	126,98	139,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	107,00	113,74	121,08	128,10
	1 Penyediaan Akomodasi	100,00	108,33	117,07	128,65	140,14
	2 Penyediaan Makan Minum	100,00	106,78	113,20	119,86	126,16
J	Informasi dan Komunikasi	100,00	112,06	127,47	142,95	158,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	103,55	113,29	122,08	127,63
	1 Jasa Perantara Keuangan	100,00	100,34	111,71	120,27	122,66
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	100,00	107,09	115,81	125,99	135,53
	3 Jasa Keuangan Lainnya	100,00	107,01	111,70	116,64	124,02
	4 Jasa Penunjang Keuangan	100,00	107,51	116,94	126,99	136,04
L	Real Estat	100,00	106,67	113,83	119,60	125,54
M,N	Jasa Perusahaan	100,00	107,57	115,05	124,54	135,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	111,87	113,41	110,17	111,50
P	Jasa Pendidikan	100,00	106,23	112,63	116,62	120,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	108,28	117,43	124,20	132,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	100,00	113,31	123,20	132,54	143,76
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	106,73	113,70	120,65	127,82

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2010–2014

Lapangan Usaha/Industry		2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	108,92	112,81	120,29	126,28
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	100,00	107,51	112,07	119,23	125,33
	a. Tanaman Pangan	100,00	109,98	113,68	120,26	123,77
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	100,00	107,35	111,96	117,87	121,93
	c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	100,00	107,86	112,48	119,44	125,70
	e. Perkebunan Tahunan	-	-	-	-	-
	f. Peternakan	100,00	103,39	106,73	114,93	121,13
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	100,00	109,70	119,11	137,85	144,47
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
	3 Perikanan	100,00	111,13	113,91	121,87	127,68
B	Pertambangan dan Penggalian	100,00	123,17	133,30	142,80	152,54
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	100,00	126,91	139,03	150,56	161,14
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	100,00	103,59	104,50	105,50	112,18
C	Industri Pengolahan	100,00	108,84	118,01	124,28	134,52
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	100,00	112,59	123,01	131,86	154,56
	2 Industri Makanan dan Minuman	100,00	105,23	111,23	118,37	128,16
	3 Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	100,00	108,90	117,53	126,89	135,26
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	100,00	107,67	113,41	122,64	129,06
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	100,00	109,95	117,83	125,84	137,24
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	100,00	110,85	116,47	126,32	139,38
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	100,00	108,98	119,85	122,85	126,20
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	100,00	107,93	112,89	131,03	141,53
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	100,00	109,52	119,18	132,21	135,42
	11 Industri Logam Dasar	100,00	108,76	119,51	131,08	138,39
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	100,00	108,20	115,96	123,97	124,98
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	100,00	113,13	124,25	135,02	156,96
	14 Industri Alat Angkutan	100,00	109,03	118,55	123,71	136,85
	15 Industri Furnitur	100,00	112,53	122,65	135,22	160,06
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	100,00	112,07	126,92	138,46	155,71
D	Pengadaan Listrik, Gas	100,00	126,24	141,41	138,47	149,07
	1 Ketenagalistrikan	100,00	106,31	106,27	99,27	109,95
	2 Gas	100,00	137,53	162,16	162,39	173,27
E	Pengadaan Air	100,00	102,56	103,91	107,33	111,42
F	Konstruksi	100,00	106,01	111,82	117,55	124,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	107,08	108,41	119,75	133,14
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	100,00	105,77	109,49	120,35	131,29
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	100,00	107,34	108,20	119,63	133,53
H	Transportasi dan Pergudangan	100,00	105,47	109,24	120,22	131,30
	1 Angkutan Rel	100,00	101,94	110,00	122,10	129,75
	2 Angkutan Darat	100,00	105,19	106,25	122,28	134,13
	3 Angkutan Laut	100,00	104,89	110,58	120,39	132,63
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	100,00	102,55	105,59	111,35	117,54
	5 Angkutan Udara	100,00	104,13	108,13	114,09	135,80
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	100,00	106,21	112,56	117,59	126,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	106,83	113,51	122,32	133,88
	1 Penyediaan Akomodasi	100,00	107,68	119,47	137,76	148,13
	2 Penyediaan Makan Minum	100,00	106,69	112,51	119,66	131,34
J	Informasi dan Komunikasi	100,00	100,38	99,55	100,14	99,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	105,39	114,30	120,63	126,69
	1 Jasa Perantara Keuangan	100,00	105,62	116,71	122,83	129,49
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	100,00	105,03	111,78	118,92	124,88
	3 Jasa Keuangan Lainnya	100,00	105,05	112,36	117,89	121,20
	4 Jasa Penunjang Keuangan	100,00	106,27	109,71	114,26	121,58
L	Real Estat	100,00	105,08	106,34	110,90	119,56
M,N	Jasa Perusahaan	100,00	106,51	111,06	116,59	124,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	117,94	133,86	146,75	159,24
P	Jasa Pendidikan	100,00	104,81	112,30	123,58	138,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	106,86	112,93	122,99	132,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	100,00	103,38	107,50	118,52	128,84
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	106,68	112,02	119,26	128,16

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha (persen), 2010–2014

Lapangan Usaha/Industry		2011	2012	2013*	2014**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,92	3,57	6,63	4,98
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7,51	4,25	6,39	5,12
	a. Tanaman Pangan	9,98	3,37	5,78	2,92
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	7,35	4,29	5,28	3,44
	c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	7,86	4,28	6,19	5,24
	e. Perkebunan Tahunan	-	-	-	-
	f. Peternakan	3,39	3,23	7,68	5,40
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	9,70	8,58	15,73	4,80
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-
	3 Perikanan	11,13	2,50	6,99	4,76
B	Pertambangan dan Penggalian	23,17	8,23	7,13	6,82
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	26,91	9,55	8,29	7,03
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3,59	0,88	0,96	6,33
C	Industri Pengolahan	8,84	8,42	5,32	8,23
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	12,59	9,26	7,19	17,21
	2 Industri Makanan dan Minuman	5,23	5,70	6,42	8,27
	3 Pengolahan Tembakau	-	-	-	-
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8,90	7,92	7,97	6,59
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	7,67	5,33	8,14	5,24
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	9,95	7,16	6,79	9,06
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	10,85	5,07	8,46	10,34
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8,98	9,97	2,51	2,73
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	7,93	4,59	16,07	8,01
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	9,52	8,82	10,93	2,43
	11 Industri Logam Dasar	8,76	9,89	9,69	5,58
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	8,20	7,18	6,91	0,82
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	13,13	9,83	8,66	16,25
	14 Industri Alat Angkutan	9,03	8,73	4,35	10,63
	15 Industri Furnitur	12,53	9,00	10,25	18,37
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	12,07	13,25	9,09	12,45
D	Pengadaan Listrik, Gas	26,24	12,02	(2,08)	7,65
	1 Ketenagalistrikan	6,31	(0,04)	(6,58)	10,75
	2 Gas	37,53	17,91	0,14	6,70
E	Pengadaan Air	2,56	1,32	3,30	3,81
F	Konstruksi	6,01	5,48	5,12	6,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,08	1,25	10,46	11,18
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	5,77	3,52	9,93	9,08
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	7,34	0,80	10,56	11,62
H	Transportasi dan Pergudangan	5,47	3,57	10,05	9,21
	1 Angkutan Rel	1,94	7,91	11,00	6,26
	2 Angkutan Darat	5,19	1,01	15,09	9,69
	3 Angkutan Laut	4,89	5,43	8,86	10,17
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	2,55	2,97	5,46	5,55
	5 Angkutan Udara	4,13	3,84	5,52	19,03
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	6,21	5,98	4,47	7,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,83	6,25	7,77	9,45
	1 Penyediaan Akomodasi	7,68	10,95	15,31	7,52
	2 Penyediaan Makan Minum	6,69	5,46	6,35	9,76
J	Informasi dan Komunikasi	0,38	(0,83)	0,59	(0,29)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,39	8,45	5,54	5,02
	1 Jasa Perantara Keuangan	5,62	10,50	5,24	5,42
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	5,03	6,43	6,39	5,01
	3 Jasa Keuangan Lainnya	5,05	6,96	4,92	2,81
	4 Jasa Penunjang Keuangan	6,27	3,24	4,14	6,41
L	Real Estat	5,08	1,21	4,28	7,81
M,N	Jasa Perusahaan	6,51	4,27	4,98	6,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,94	13,49	9,63	8,51
P	Jasa Pendidikan	4,81	7,15	10,05	12,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,86	5,68	8,91	7,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,38	3,98	10,26	8,70
Produk Domestik Regional Bruto		6,68	5,00	6,47	7,47

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Salemba Tengah No. 36-38 Paseban Senen Jakarta Pusat 10440
Telp: +62 21 31928493, Fax: +62 21 3152004
e-mail: bps3100@bps.go.id
website: <http://jakarta.bps.go.id>